

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DI NRUMKIMHUB KABUPATEN BLORA  
PERIODE  
1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

BAB I PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada dasarnya merupakan rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan DINRUMKIMHUB dalam menyelenggarakan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan Keuangan DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi OPD berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kami selaku Pengguna Anggaran harus mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan di entitasnya. Bentuk pertanggung-jawaban

keuangan tersebut berupa penyajian Laporan Keuangan DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh DINRUMKIMHUB selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan DINRUMKIMHUB terutama digunakan untuk membandingkan realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan DINRUMKIMHUB, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

#### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penata Usahaan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora,
- Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora
- Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora
- Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD
Bab IV	Ikhtisar Laporan Keuangan
Bab V	Kebijakan Akuntansi
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan OPD
Bab VII	Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

#### 2.1. Ekonomi Makro

DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada Tahun 2018 pada awalnya mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp 80.679.264.045,- Sedangkan untuk alokasi pendapatan daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 970.471.000,- Anggaran Belanja Tahun 2018 sebesar Rp 80.679.264.045,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.251.065.045,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 74.428.199.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.398.491.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 9.350.559.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 63.679.149.000,- Setelah Perubahan DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp 89.899.031.150,- sedangkan pendapatan daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 973.000.000,- Anggaran Belanja Tahun 2018 setelah Perubahan terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.304.423.550,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 83.594.607.600,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.517.281.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 10.876.982.500,- dan Belanja Modal sebesar Rp 71.200.344.100,-

Pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2017 DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada awalnya mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp 76.476.612.000,- Sedangkan untuk alokasi pendapatan daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 910.500.000,- Anggaran Belanja Tahun 2017 sebesar Rp 76.476.612.000,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.475.000.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 75.001.612.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 938.275.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 8.697.047.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 65.366.290.000,- Setelah Perubahan DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp 81.022.489.000,- sedangkan pendapatan daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 851.000.000,- Anggaran Belanja Tahun 2017 setelah Perubahan terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.913.877.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 78.108.612.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.134.655.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 9.010.232.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 67.963.725.000,-

Tabel 2.1.1  
Perbandingan Anggaran Tahun 2017 dan Anggaran Tahun 2018

dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik/Turun
Pendapatan	973.000.000	851.000.000	122.000.000
Belanja :			
• Belanja Tidak Langsung	6.304.423.550	2.913.877.000	3.390.546.550
• Belanja Langsung	83.594.607.600	78.108.612.000	5.485.995.600
➤ Bel. Pegawai	1.517.281.000	1.134.655.000	382.626.000
➤ Bel. Barang/Jasa	10.876.982.500	9.010.232.000	1.866.750.500
➤ Bel. Modal	71.200.344.100	67.963.725.000	3.236.619.100
Total Belanja	89.899.031.150	81.022.489.000	8.876.542.150

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2017 dan 2018 DINRUMKIMHUB. Kab. Blora

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar didapatkan perencanaan anggaran yang memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas maka Penyusunan APBD harus didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penyusunan APBD tepat waktu sesuai tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ;
3. Penyusunan APBD secara transparan dan akuntabel agar memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi APBD;
4. Penyusunan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
5. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisa perkembangan ekonomi daerah. Selain itu dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Program-program yang dilaksanakan dalam anggaran tahun 2018, sudah diselaraskan dengan prioritas program yang telah ditetapkan dalam

RENJA. Disamping itu, penggunaan anggaran selalu memperhatikan pada asas-asas pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini perlu diterapkan agar pelaksanaan program berhasil dengan optimal dan memberikan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kinerja aparat birokrasi.

### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Melalui kebijakan keuangan yang telah ditetapkan, alokasi anggaran pendapatan pada DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora Tahun 2018 adalah sebesar Rp 973.000.000,- Anggaran Pendapatan Asli Daerah DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora meliputi Retribusi Jasa Umum dengan anggaran sebesar Rp 740.000.000,- yang terdiri beberapa jenis Retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar Rp 15.000.000,- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp 375.000.000,- dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 350.000.000,- Selain Retribusi Jasa Umum Anggaran Pendapatan Asli Daerah juga meliputi Retribusi Jasa Usaha dengan anggaran sebesar Rp 63.000.000,- yang terdiri dari Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar Rp 27.000.000,- dan Retribusi Terminal sebesar Rp 36.000.000,- Dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Blora juga meliputi Retribusi Perijinan Tertentu yaitu Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp 10.000.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebesar Rp 160.000.000,- Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 0,- dan Pendapatan dari Sewa Rusunawa sebesar Rp 160.000.000,- Untuk Anggaran Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sebesar Rp 27.000.000,- terdiri dari Sewa Abonemen Kios Rp 24.000.000,- dan MCK Rp 3.000.000,-

Tabel 2.2.1

Perbandingan Anggaran PAD Tahun 2018 dan Tahun 2017

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Ret.Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	15.000.000	13.000.000
Ret.Pelay.Parkir Tepi Jln.Umum	375.000.000	350.000.000
Ret.Pengujian Kend.Bermotor	350.000.000	330.000.000
Ret.Psr.Grosir/Pertokoan	27.000.000	58.000.000
Ret.Terminal	36.000.000	35.000.000
Ret.Ijin Trayek	10.000.000	10.000.000

Pendptn. atas Penj/Angs.Kios	0	15.000.000
Pendapatan dari Sewa Rusunawa	160.000.000	40.000.000
<b>Total PAD</b>	<b>973.000.000</b>	<b>851.000.000</b>

Sumber : DPA Perubahan TA 2017 dan 2018 DINRUMKIMHUB. Kab. Blora

DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora karena merupakan OPD baru yang baru terbentuk pada akhir tahun 2016. Untuk Tahun Anggaran 2017 Pendapatan Asli Daerah DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 851.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 866.585.125,- atau tercapai sebesar 101,83%. Dengan perincian masing-masing retribusi sebagai berikut : Retribusi Jasa Umum dengan anggaran sebesar Rp 693.000.000,- terealisasi sebesar Rp 718.098.600,- atau tercapai 103,62%, yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dengan anggaran sebesar Rp 13.000.000,- dan tercapai sebesar Rp 13.670.000 atau sebesar 105,15% Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan anggaran Rp 350.000.000,- tercapai sebesar Rp 371.196.500,- atau sebesar 106,06 %, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp 330.000.000,- tercapai sebesar Rp 333.232.100,- atau sebesar 100,98 %; Retribusi Jasa Usaha dengan anggaran sebesar Rp 93.000.000,- tercapai sebesar Rp 60.909.800,- atau 65,49%, yang terdiri dari Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dengan anggaran sebesar Rp 58.000.000,- tercapai sebesar Rp 26.899.800,- atau 46,38% terdiri dari Sewa Abonemen Kios dengan anggaran sebesar Rp 50.500.000,- tercapai sebesar Rp 23.949.800,- atau 47,43% dan MCK dengan anggaran sebesar Rp 7.500.000,- tercapai sebesar Rp 2.950.000,- atau 39,33%, Retribusi Terminal dengan anggaran Rp 35.000.000,- tercapai sebesar Rp 34.010.000,- atau tercapai sebesar 97,17%, dan Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu Retribusi Ijin Trayek dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- tercapai sebesar Rp 8.024.000,- atau 80,24%; dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp 55.000.000,- dan tercapai sebesar Rp 79.552.725,- atau tercapai sebesar 144,64% yaitu Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan tercapai sebesar Rp 7.130.000,- atau sebesar 47,53% serta Pendapatan dari Sewa Rusunawa dengan anggaran sebesar Rp 40.000.000,- dan tercapai sebesar Rp 72.422.725 atau 181,06%

Untuk Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Asli Daerah DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 973.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 1.103.314.854,- atau tercapai sebesar 113,39%. Dengan perincian masing-masing retribusi sebagai berikut : Retribusi Jasa

Umum dengan anggaran sebesar Rp 740.000.000,- terealisasi sebesar Rp 769.751.300,- atau tercapai 104,02%, yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan tercapai sebesar Rp 15.080.000,- atau sebesar 100,53% Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan anggaran Rp 375.000.000,- tercapai sebesar Rp 412.500.000,- atau sebesar 110,00 %, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp 350.000.000,- tercapai sebesar Rp 342.171.300,- atau sebesar 97,76 %; Retribusi Jasa Usaha dengan anggaran sebesar Rp 63.000.000,- tercapai sebesar Rp 128.629.000,- atau 204,17%, yang terdiri dari Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan dengan anggaran sebesar Rp 27.000.000,- tercapai sebesar Rp 88.840.000,- atau 329,04% terdiri dari Sewa Abonemen Kios dengan anggaran sebesar Rp 24.000.000,- tercapai sebesar Rp 85.840.000,- atau 357,67% dan MCK dengan anggaran sebesar Rp 3.000.000,- tercapai sebesar Rp 3.000.000,- atau 100%, Retribusi Terminal dengan anggaran Rp 36.000.000,- tercapai sebesar Rp 36.039.000,- atau tercapai sebesar 100,11%, serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak ada anggarannya atau sebesar Rp 0,- dan terealisasi sebesar Rp 3.750.000,- dan Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu Retribusi Ijin Trayek dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- tercapai sebesar Rp 3.792.000,- atau 37,92%; dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp 160.000.000,- dan tercapai sebesar Rp 201.142.554,- atau tercapai sebesar 125,71% yaitu Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios dengan anggaran sebesar Rp 0,- dan tercapai sebesar Rp 2.000.000,- serta Pendapatan dari Sewa Rusunawa dengan anggaran sebesar Rp 160.000.000,- dan tercapai sebesar Rp 199.142.554,- atau 124,46%

Untuk Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios, sebenarnya pada awal Tahun 2018 ini merupakan sisa Piutang Pendapatan Penjualan atas Angsuran Kios yang belum terealisasi pada akhir tahun 2017 yaitu sebesar Rp 21.480.000,- Pada awalnya sisa Piutang Pendapatan Penjualan atas Angsuran Kios hanya sebesar Rp 17.490.000,- namun karena ada koreksi BPK yaitu Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios dari Cepu yang ternyata seharusnya masih masuk di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora karena untuk Piutang tidak bisa dihapuskan begitu saja, dan awalnya merupakan saldo Piutang dari DPPKKI Kabupaten Blora, yaitu dari Terminal Cepu meskipun Terminal Cepu sudah ikut ke Pusat dan tidak masuk dalam DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora, yaitu sebesar Rp 3.990.000,- maka saldo Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios pada akhir tahun 2017 di Neraca



DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora menjadi sebesar Rp 21.480.000,- Pada awal tahun 2017 masih terdapat Piutang Pendapatan Penjualan atas Angsuran Kios sebesar Rp 28.610.000,- yang terdiri dari sisa Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios dari Terminal Cepu sebesar Rp 3.990.000,- dan Terminal Ngawen sebesar Rp 24.620.000,- dan pada tahun 2017 terdapat Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 7.130.000,- sehingga sisanya akan menjadi Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios, dan sesuai Hasil Penelusuran Piutang masuk dalam Kategori I, yaitu dalam kenyataannya masih ada pembayaran atau masih dapat ditagih pembayarannya karena masih ada kesanggupan dari masing-masing debitur untuk membayar yang diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan kesanggupan membayar dari masing-masing debitur. Piutang Penjualan Angsuran Kios yang semula masuk dalam Pendapatan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika pada tahun ini juga dilakukan koreksi dan masuk menjadi Piutang Penjualan Angsuran Kios Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora, dan seperti tahun sebelumnya karena semuanya sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun maka Penyisihan Piutangnya 100% sehingga pada akhir tahun 2017 Piutang Penjualan Angsuran Kiosnya adalah Rp 0,-

Pada akhir Tahun 2017 ini dengan adanya realisasi Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 7.130.000,- maka yang belum terealisasi akan menjadi Piutang Penjualan Angsuran Kios di tahun berikutnya, sehingga jika pada awal Tahun 2017 masih ada Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 28.610.000,- setelah dikurangi yang dari cepu sebesar Rp 3.990.000,- maka pada akhir Tahun 2017 ini timbul Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 17.490.000,- karena selama tahun 2017 terdapat Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 7.130.000,- Setelah adanya koreksi dari BPK, yaitu penambahan kembali Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios Cepu maka Piutang Penjualan Angsuran Kios menjadi sebesar Rp 21.480.000,- sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 masuk dalam umur piutang sudah melebihi jatuh tempo lebih dari 5 tahun sehingga masuk dalam kategori Penyisihan Piutangnya 100%. Meskipun masing-masing telah membuat surat kesanggupan membayar dalam jangka waktu berapa tahun, namun apabila dilihat dari Surat Perjanjian Awalnya sudah jatuh tempo semua. Khusus untuk yang Cepu karena tidak ada Surat Perjanjian Awal, diasumsikan jatuh temponya sama dengan yang ada di Ngawen, yaitu telah jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Untuk Ngawen yang Surat Perjanjian Awalnya ada jatuh tempo adalah tahun 2009 dan 2010,

sedang untuk Cepu yang tidak ada Surat Perjanjian Awalnya diasumsikan juga telah jatuh tempo lebih dari 5 tahun karena jika dilihat kebelakang adanya Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios bersamaan waktunya. Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios pada awalnya timbul karena sesuai Surat Perjanjian Awal adalah Pemberian Hak Penggunaan Tempat Usaha atau Kios Pertokoan dengan membayar Harga Kios yang telah disepakati sesuai dalam Surat Perjanjian dengan cara membayar uang muka dan sisanya akan diangsur. Namun dalam kenyataannya sisa angsuran tersebut masih ada yang belum terbayar hingga saat ini. Sehingga Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios pada akhir tahun yang belum terbayar akan menjadi Piutang Pendapatan atas Angsuran Kios. Dengan demikian pada akhir Tahun 2017 di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora Piutang Penjualan Angsuran Kiosnya yang semula ada sebesar Rp 17.490.000,- dan setelah koreksi BPK menjadi RP 21.480.000,- karena Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Kiosnya sebesar 100 % atau semuanya dimasukkan sebagai Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 21.480.000,- Dengan demikian di Neraca di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora akan nampak Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 21.480.000, tetapi ada Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Kiosnya juga sebesar Rp 21.480.000,- sehingga Piutang Penjualan Angsuran Kiosnya Rp 0,-

Selain Piutang Pendapatan atas Penjualan Kios, di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora juga terdapat Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa. Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa ini terjadi karena adanya Surat Perjanjian Sewa Rusunawa yang dilakukan para penghuni Rusunawa, yaitu selama 3 (tiga) tahun, sehingga sudah ada pendapatan yang seharusnya diterima selama tiga tahun yang akan dicatat sebagai Piutang untuk Pendapatan yang belum terbayar karena sudah dicatat untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Pada akhir tahun 2017 terdapat Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp 100.487.500,- dan penyisihan piutang pendapatan sewa rusunawanya sebesar Rp 502.438,- Namun karena ada koreksi BPK untuk Piutang Rusunawa, yaitu yang menjadi Piutang tidak hanya Sewa yang belum terbayar saja, tetapi juga Piutang Listrik, PAM dan Denda Pembayaran maka Piutang Sewa Rusunawa DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada akhir tahun 2017 di Neraca menjadi sebesar Rp 104.775.396,- dan Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa Rusunawanya menjadi Rp 523.877,-

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2017 DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora tercapai sebesar Rp 866.585.125,- dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 851.000.000,- atau tercapai sebesar 101,83 %. Dengan demikian untuk realisasi PAD yang ditetapkan untuk DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora di Tahun 2017 dapat tercapai lebih dari 100%. Untuk Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora tercapai sebesar Rp 1.103.314.854,00,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 973.000.000,- atau tercapai sebesar 113,39 %. Dengan demikian untuk realisasi PAD yang ditetapkan untuk DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora di Tahun 2018 dapat tercapai lebih dari 100%.

Tabel 2.2.2  
Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2018 dan Tahun 2017

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Ret. Pelay. Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.080.000	13.670.000
Ret.Pelay.Parkir Tepi Jln.Umum	412.500.000	371.196.500
Ret.Pengujian Kend.Bermotor	342.171.300	333.232.100
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	3.750.000	
Ret.Psr.Grosir/Pertokoan	88.840.000	26.899.800
Ret.Terminal	36.039.000	34.010.000
Ret.Ijin Trayek	3.792.000	8.024.000
Pendptn.atas Penj/Angs.Kios	2.000.000	7.130.000
Pendapatan dari Sewa Rusunawa	199.142.554	72.422.725
<b>Total PAD</b>	<b>1.103.314.854,00</b>	<b>866.585.125</b>

Sumber : LRA 2017 dan 2018 DINRUMKIMHUB Kab. Blora

### 2.2.2. Kebijakan Belanja

Program-program yang dilaksanakan dalam anggaran Tahun 2018, sudah diselaraskan dengan prioritas program yang telah ditetapkan dalam RENJA. Disamping itu, penggunaan anggaran selalu memperhatikan pada asas-asas pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini perlu diterapkan agar pelaksanaan program berhasil dengan optimal dan memberikan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kinerja aparat birokrasi.

Tabel 2.2.3  
Realisasi Anggaran Tahun 2017

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
Pendapatan	851.000.000	866.585.125	15.585.125
Belanja :			
• Belanja Tidak Langsung	2.913.877.000	2.565.816.392	(348.060.608)
• Belanja Langsung	78.108.612.000	75.311.123.933	(2.797.488.067)
➤ Belanja Pegawai	1.134.655.000	1.054.860.000	(79.795.000)
➤ Bel.Barang/Jasa	9.010.232.000	7.998.230.833	(1.012.001.167)
➤ Belanja Hibah	0	0	0
➤ Belanja Modal	67.963.725.000	66.258.033.100	(1.705.691.900)
Total Belanja	81.022.489.000	77.876.940.325	(3.145.548.675)

Sumber : DPA Perubahan TA 2017 dan LRA TA 2017 DINRUMKIMHUB Kab. Blora

Tabel 2.2.4  
Realisasi Anggaran Tahun 2018

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
Pendapatan	973.000.000	1.103.314.854	130.314.854
Belanja :			
• Belanja Tidak Langsung	6.304.423.550	6.249.905.723	(54.517.827)
• Belanja Langsung	83.594.607.600	80.467.299.453	(3.127.308.147)
➤ Belanja Pegawai	1.517.281.000	1.458.799.600	(58.481.400)
➤ Bel.Barang/Jasa	10.876.982.500	10.187.570.533	(689.411.967)
➤ Belanja Modal	71.200.344.100	68.820.929.320	(2.379.414.780)
Total Belanja	89.899.031.150	86.717.205.176	(3.181.825.974)

Sumber : DPA Perubahan TA 2018 dan LRA TA 2018 DINRUMKIMHUB Kab. Blora

Anggaran belanja Tahun 2018 sebesar Rp 89.899.031.150,- dan telah terealisasi sebesar Rp 86.717.205.176,- atau 96,46% dengan rincian sebagai berikut, Belanja Tidak Langsung yang merupakan Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 6.304.423.550,- terealisasi Rp 6.249.905.723,- atau 99,14% dan Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp 83.594.607.600,- terealisasi sebesar Rp 80.467.299.453,- atau 96,26%. Untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 1.517.281.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.458.799.600,- atau 96,15%, Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 10.876.982.500,- dan terealisasi sebesar Rp 10.187.570.533,- atau 93,66% dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp 71.200.344.100,- dan terealisasi sebesar Rp 68.820.929.320,- atau 96,66%. Sedangkan tahun 2017

Anggaran belanja sebesar Rp 81.022.489.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 77.876.940.325,- atau 96,12% dengan rincian sebagai berikut, Belanja Tidak Langsung yang merupakan Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 2.913.877.000,- terealisasi Rp 2.565.816.392,- atau 88,06% dan Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp 78.108.612.000,- terealisasi sebesar Rp 75.311.123.933,- atau 96,42%. Untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 1.134.655.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.054.860.000,- atau 92,97%, Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 9.010.232.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.998.230.833,- atau 88,77 dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp 67.963.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp 66.258.033.100,- atau 97,49%. Dari uraian di atas nampak bahwa dari alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora di Tahun 2018 penyerapannya lebih dari 90%, yaitu 96,46% Sedangkan Tahun 2017 Anggaran Belanja DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora dapat Terealisasi sebesar 96,12% mengalami peningkatan sebesar 0,34%.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan yang bersifat untuk peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat kami laporkan sebagai berikut :

#### 1.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa pelayanan surat menyurat selama 12 bulan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa pembayaran telepon, listrik dan internet selama 12 bulan.
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Bahan Habis Pakai selama 12 Bulan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa pembayaran honor pengelola administrasi keuangan selama 12 bulan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa pengadaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa ketersediaan alat tulis kantor selama 12 bulan.
  9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa ketersediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor selama 12 bulan.
  10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pengadaan alat-alat instalasi dan lampu penerangan selama 12 bulan.
  11. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan suku cadang peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.
  12. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa pembayaran langganan surat kabar/majalah selama 12 bulan.
  13. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman berupa minuman harian pegawai, makanan dan minuman tamu selama 12 bulan.
  14. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa pembelian BBM dan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 12 bulan.
  15. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah berupa pembelian BBM dan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 12 bulan.
- 1.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas berupa service, penggantian suku cadang dan olie pelumas.
  3. Pengadaan Mebeler
  4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Bekala Mebeler
- 1.3.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 1.3.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 1.3.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
  2. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  4. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
  5. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
  6. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
  7. Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks
- 1.3.6. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum
1. Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya  
Penyediaan Honorarium Tenaga Kontrak Daerah
- 1.3.7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  2. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
  3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
  4. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
- 1.3.8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
  2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- 1.3.9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1. Uji kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang
  2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
  3. Pemilihan dan Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
  4. Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru
  5. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan
  6. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
  7. Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
  8. Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
  9. Analisis database pelayanan parkir
- 1.3.10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- 1.3.11. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
  1. Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU)
  2. Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum (PJU)
  3. Meterisasi PJU Rayon PLN Cepu
  4. Meterisasi PJU Rayon PLN Blora
  5. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Todanan
  6. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Banjarejo
  7. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kunduran
  8. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Ngawen
  9. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Japah
  10. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kedungtuban
  11. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jati
  12. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Randublatung
  13. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Bogorejo
  14. Pemeliharaan Jaringan PJU se-Kabupaten Blora dan Pemeliharaan Lampu Higmass serta Lampu Jembatan
  15. Pengadaan Lampu PJU Cadangan (Wilayah I dan II)
  16. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Blora
  17. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Tunjungan
  18. Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah I
  19. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Cepu
  20. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Sambong
  21. Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Kradenan
  22. Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah II
  23. Penggantian Lampu LED Jl. Ahmad Yani dan Jl. Dr. Sutomo
- 1.3.12. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
  2. Pengadaan marka jalan
- 1.3.13. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  1. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
- 1.3.14. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  1. Pembangunan Pagar makam Bangkle
  2. Pembangunan Pagar Makam Singo Lodro Kel. Mlangsen
- 1.3.15. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  1. Pemeliharaan ruang terbuka hijau



2. Perbaiki taman tugu batas kota
  3. Perbaiki Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu
  4. Pembangunan Lapangan Basket dan Estetika Lingkungan Taman Aryo Jipang Cepu (Selatan Terminal Cepu)
  5. Penataan Lapangan Golf Blora
- 1.3.16. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
  2. Peningkatan Jalan RT. 07 RW. 05 Kel. Jepon Kec. Jepon
  3. Rehabilitasi Trotoar Jl. Gunung Lawu Kec. Blora
  4. Rehabilitasi Trotoar/Drainase Jl. KH. Ahmad Dahlan Kec. Blora
  5. Rehabilitasi Trotoar Jl. Ngareng Kec. Cepu
  6. Pemeliharaan Jaling/Drainase Kel. Karangjati Kec. Blora
  7. Pemeliharaan Jaling/Drainase Lingkungan Kel. Mlangsen Kec. Blora
  8. Rehabilitasi Trotoar Jl. Diponegoro Utara Kec. Cepu
  9. Drainase Jl. Gajah Mada
  10. Rehabilitasi Masjid Agung Baitunnur Blora
  11. Pembuatan DED Gedung Sasana Bhakti Blora
  12. Pembangunan Trotoar Jl. Gunung Sumbing
  13. Pembangunan Trotoar Jl. Gunung Sindoro
  14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
  15. Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Bangkle
  16. BOP Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
  17. Rehabilitasi Trotoar Jl. Raya Cepu
  18. Rehabilitasi Trotoar Jl. Surabaya Cepu
  19. Rehabilitasi Trotoar Jl. Pemuda Cepu
  20. Rehabilitasi Drainase Pasar Induk Cepu sampai Tuk Buntung kelurahan Balun
  21. Pembangunan Trotoar Jalan Rajawali (Lanjutan)
  22. Pembangunan trotoar/Drainase Jl. Tentara Pelajar
  23. Pembangunan Jalan Lingkungan Puskesmas Randublatung
  24. Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Jepon Kec. Jepon
  25. Peningkatan Jalan Lingkungan/Drainase Sitimulyo RT. 10 RW. II Kel. Cepu Kec. Cepu
  26. Peningkatan Jalan Lingkungan Karangboyo s.d Dukuh Sambongan Kel. Karangboyo Kec. Cepu
  27. Pembangunan Drainase, Talud RW. III Kel. Jepon Kec. Jepon

28. Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving dan Talud) RW. II Kel. Jepon Kec. Jepon
  29. Pembangunan Gedung Pemerintah dan Gedung Publik
  30. Pembangunan Trotoar/Drainase I
  31. Pembangunan Trotoar/Drainase II
- 1.3.17. Program Bidang Pekerjaan Umum Bersumber Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendampingnya
1. DDUB RUSUNAWA
  2. Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan PAMSIMAS
  3. Sanitasi Kel. Kauman Kec. Blora
  4. Sanitasi Kel. Beran Kec. Blora
  5. Sanitasi Kel. Bangkle Kec. Blora
  6. Biaya Penunjang Kegiatan Sanitasi
  7. Pembangunan Drainase/Talud Jalan Bhayangkara
  8. Peningkatan Jalan Kelurahan kunduran kecamatan Kunduran Kab. Blora
  9. Pemeliharaan Jalan/Drainase jl. Gg. Amarta Komplek Balun Graha kel. Balun kec. Cepu
- 1.3.18. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1. Peningkatan Jaling Perumda Kunden Kel. Kunden Kec. Blora
- 1.3.19. Program Lingkungan Sehat Perumahan
1. Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 01 RW 02 Kel. Ngawen, Kec. Ngawen
  2. Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) Jalan Jatikusumo RT 03 RW 05 Kelurahan Wulung Kec. Randublatung
  3. Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 6,7, 8, RW 9 Kelurahan Cepu, Kec. Cepu
  4. Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 1, 2, 3, 4, 5 RW 9 Kelurahan Cepu, Kec. Cepu
  5. Pembangunan Talud RW 05 Kel. Jepon, Kec. Jepon
  6. Peningkatan Jalan Lingkungan RW 01 Kel. Jepon, Kec. Jepon
  7. Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 Kulonkali, Kel. Ngawen, Kec. Ngawen
  8. Peningkatan Jalan Lingkungan (Aspal) RT 04 RW 01 Kel. Tegalgungung
  9. Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) Jalan Mangga Lorong 1 RT 08 RT 09 RW II Kel. Mlangsen

10. Pavingisasi Jl. Gelatik 8 RT.05 RW. 5 Perumnas Karangjati Kec. Blora
11. Pavingisasi Dk. Sawahan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Randublatung Kec. Randublatung
12. Pavingisasi Jaling Dk. Beran Rt. 02 Rw. 03 Kel. Randublatung Kec. Randublatung
13. Peningkatan Jaling Karang pace Rt. 09 Kel. Randublatung Kec. Randublatung (lanjutan )
14. Pavingisasi lanjutan RT 07 RW 05 Kel. Jepon Kec. Jepon
15. Pavingisasi RT.01, 02, 03 / RW.03 Dk. Dukuhan Kel. Sonorejo Kec. Blora
16. Pembangunan jalan/talud makam Dk. Sono, Kel. Sonorejo, Kec. Blora
17. Pavingisasi jaling megal Kel. Balun Kec. Cepu
18. Peningkatan jalan RT.01 RW.03 Dk. Undaan Kel. Sonorejo Kec. Blora
19. Pembangunan jaling Dk. Taman etan Kel. Wulung Kec. Randublatung
20. Pavingisasi jaling RT.02/RW.05 Kel. Ngelo, Kec. Cepu
21. Peningkatan jaling \"Griya Mustika Sejahtera\" RT.03/RW.06 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu
22. Peningkatan jaling Sitimulyo lorong 4 RW II Kec. Cepu
23. Pavingisasi jalan Pelem - Kidangan Kec. Jepon
24. Pembangunan drainase RT.08 RW.05 Kel. Jepon Kec. Jepon
25. Pavingisasi jalan RT.2 RW.1 Kel. Bangkle Kec. Blora
26. Peningkatan jembatan Balun Sawahan Lr. 2 RT. 3 RW. 11 Kel. Balun Kec. Cepu
27. Pavingisasi jaling Dk. Sawahan Kel. Tempelan Kec. Blora
28. Pavingisasi jaling Dk. Kajangan Ds. Sonorejo Kec. Blora
29. Peningkatan jaling jl. A. Yani Lr. 1,2 dan 3 Kavling belakang GOR Mustika Blora Kel. Karangjati
30. Peningkatan jalan Mentul Indah RW.04 Kel. Karangboyo (Lanjutan)
31. Peningkatan jaling depan Kelurahan Karangboyo
32. Pembangunan drainase Kampung Baru RW.03 Kel. Karangboyo (Lanjutan)
33. Peningkatan jalan PKU - Megalrejo RW.13 - RW.14 Kel. Balun

34. Pavingisasi RT.01/RW.03 Kel. Kunduran Kec. Kunduran (Lanjutan)
  35. Pemeliharaan jalan paving RT.03 RW.03 Kel. Karangboyo
  36. Pavingisasi dan drainase RW.09 Kel. Cepu
  37. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Randublatung
  38. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Cepu
  39. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Karangboyo
  40. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Jepon
  41. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Beran
  42. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Bangkle
  43. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kedungjekar
  44. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Mlangsen
  45. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tambahrejo
  46. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kauman
  47. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Sonorejo
  48. Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tempelan
- 1.3.20. Program Pengembangan Perumahan
1. Operasional Rusunawa
- 1.3.21. Program Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bersumber dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendampingnya
1. PAB Kelurahan Punggursugih Kec. Ngawen
  2. PAB Kelurahan Kunduran Kec. Kunduran
  3. PAB Kelurahan Wulung Kec. Randublatung
  4. PAB Kelurahan Tambakromo Kec. Cepu
  5. PAB Kelurahan Balun Kec. Cepu
  6. PAB Kelurahan Ngelo Kec. Cepu
  7. PAB Kelurahan Ngroto Kec. Cepu
  8. PAB Kelurahan Karangboyo Kec. Cepu
  9. Sanitasi Kel. Ngawen Kec. Ngawen
  10. Sanitasi Kel. Kunduran Kec. Kunduran
  11. Pembangunan PAB Kel. Tambahrejo kec. Blora
  12. Pembangunan PAB Kel. Bangkle Kec. Blora
  13. Pembangunan PAB Kel. Beran Kec. Blora

14. Pembangunan PAB Kel. Sonorejo Kec. Blora

15. Biaya Penunjang

1.3.22. Program Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendampingnya

1. Pembangunan Drainase Kel. Kauman Kec. Blora

2. Pembangunan Drainase kel. Kunden Kec. Blora

3. Pembangunan Trotoar Pertigaan Pom Bensin - Bravo Kec. Cepu

4. Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Jetis kec. Blora

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Realisasi Pencapaian Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1  
Realisasi Pencapaian Anggaran Tahun 2018  
dalam Rupiah

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi	%
1	Pendapatan	973.000.000	1.103.314.854	113,39
2	Belanja Tidak Langsung	6.304.423.550	6.249.905.723	99,14
3	Belanja Langsung	83.594.607.600	80.467.299.453	96,26
	➤ Belanja Pegawai	1.517.281.000	1.458.799.600	96,15
	➤ Belanja Barang/ Jasa	10.876.982.500	10.187.570.533	93,66
	➤ Belanja Modal	71.200.344.100	68.820.929.320	96,66

Sumber : DPA Perubahan dan LRA 2018 DINRUMKIMHUB Kab. Blora

Tabel 3.1.2  
Realisasi Pencapaian PAD Tahun 2018

dalam Rupiah

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi	%
1	Ret.Pelay.Parkir Tepi Jln.Umum	375.000.000	412.500.000	110,00
2	Ret.Pengujian Kend.Bermotor	350.000.000	342.171.300	97,76
3	Ret.Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000	15.080.000	100,53
4	Ret.Psr.Grosir/Pertokoan	27.000.000	88.840.000	329,04
5	Ret.Terminal	36.000.000	36.039.000	100,11
6	Ret.Ijin Trayek	10.000.000	3.792.000	37,92
7	Pendptn.atas Penj/Angs.Kios	0	2.000.000	0,00
8	Pendapatan Sewa Rusunawa	160.000.000	199.142.554	124,46
	Jumlah	973.000.000	1.103.314.854	113,39

Sumber : DPA Perubahan dan LRA 2018 DINRUMKIMHUB Kab. Blora

Rincian atas capaian kinerja keuangan masing masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3  
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi	%
A	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	10.000.000	110.000	1,10
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	320.000.000	281.871.562	88,08
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	439.415.000	438.349.400	99,76
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	23.332.225	93,33
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	193.000.000	186.400.000	96,58
6	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	26.600.000	26.497.500	99,61
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23.500.000	23.500.000	100,00
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	115.000.000	114.999.800	100,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	44.475.466	74,13
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.993.400	99,97
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100,00
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.910.000	99,10
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	109.450.000	108.941.600	99,54
14	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	160.000.000	159.954.378	99,97
15	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	114.000.000	113.240.802	99,33
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan mebeler	208.235.000	207.472.500	99,63
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.885.700.800	1.835.587.800	97,34
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.200.000	69.111.791	86,17
4	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	18.200.000	17.300.000	95,05
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	128.000.000	127.774.000	99,82

2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000.000	19.350.000	96,75
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan pelatihan formal	119.000.000	94.000.000	78,99
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.400.000	9.241.000	98,31
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	5.000.000	4.991.500	99,83
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.000.000	4.995.500	99,91
4	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	5.000.000	4.934.000	98,68
5	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	5.000.000	4.971.000	99,42
6	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	10.000.000	9.966.000	99,66
7	Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks	15.000.000	13.370.000	89,13
F	Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum			
1	Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya	204.600.000	204.525.600	99,96
G	Program Pengembangan Perumahan			
1	Operasional Rusunawa	16.000.000	15.979.000	99,87
H	Program Lingkungan Sehat Perumahan			
1	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 01 RW 02 Kel. Ngawen, Kec. Ngawen	188.000.000	183.023.000	97,35
2	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) Jalan Jatikusumo RT 03 RW 05 Kelurahan Wulung Kec. Randublatung	188.000.000	185.565.000	98,70
3	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 6,7, 8, RW 9 Kelurahan Cepu, Kec. Cepu	188.000.000	184.359.000	98,06
4	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) RT 1, 2, 3, 4, 5 RW 9 Kelurahan Cepu, Kec. Cepu	500.000.000	487.070.000	97,41
5	Pembangunan Talud RW 05 Kel. Jepon, Kec. Jepon	188.000.000	182.159.000	96,89
6	Peningkatan Jalan Lingkungan RW 01 Kel. Jepon, Kec. Jepon	188.000.000	169.693.000	90,26
7	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 Kulonkali, Kel. Ngawen, Kec. Ngawen	188.000.000	182.841.000	97,26



8	Peningkatan Jalan Lingkungan (Aspal) RT 04 RW 01 Kel. Tegalgungung	94.000.000	89.839.000	95,57
9	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving) Jalan Mangga Lorong 1 RT 08 RT 09 RW II Kel. Mlangsen	94.000.000	92.770.000	98,69
10	Pavingisasi Jl. Gelatik 8 RT.05 RW. 5 Perumnas Karangjati Kec. Blora	100.000.000	87.160.000	87,16
11	Pavingisasi Dk. Sawahan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Randublatung Kec. Randublatung	100.000.000	96.988.000	96,99
12	Pavingisasi Jaling Dk. Beran Rt. 02 Rw. 03 Kel. Randublatung Kec. Randublatung	111.000.000	93.560.000	84,29
13	Peningkatan Jaling Karang pace Rt. 09 Kel. Randublatung Kec. Randublatung (lanjutan )	150.000.000	144.730.000	96,49
14	Pavingisasi lanjutan RT 07 RW 05 Kel. Jepon Kec. Jepon	125.000.000	122.087.000	97,67
15	Pavingisasi RT.01, 02, 03 / RW.03 Dk. Dukuhan Kel. Sonorejo Kec. Blora	200.000.000	184.992.000	92,50
16	Pembangunan jalan/talud makam Dk. Sono, Kel. Sonorejo, Kec. Blora	50.000.000	45.875.000	91,75
17	Pavingisasi jaling megal Kel. Balun Kec. Cepu	200.000.000	196.207.000	98,10
18	Peningkatan jalan RT.01 RW.03 Dk. Undaan Kel. Sonorejo Kec. Blora	50.000.000	49.251.000	98,50
19	Pembangunan jaling Dk. Taman etan Kel. Wulung Kec. Randublatung	200.000.000	198.775.000	99,39
20	Pavingisasi jaling RT.02/RW.05 Kel. Ngelo, Kec. Cepu	150.000.000	145.943.000	97,30
21	Peningkatan jaling \"Griya Mustika Sejahtera\" RT.03/RW.06 Kel. Karangboyo, Kec. Cepu	200.000.000	193.111.000	96,56
22	Peningkatan jaling Sitimulyo lorong 4 RW II Kec. Cepu	100.000.000	90.962.000	90,96
23	Pavingisasi jalan Pelem - Kidangan Kec. Jepon	800.000.000	783.457.000	97,93
24	Pembangunan drainase RT.08 RW.05 Kel. Jepon Kec. Jepon	200.000.000	186.202.000	93,10
25	Pavingisasi jalan RT.2 RW.1 Kel. Bangkle Kec. Blora	50.000.000	48.838.000	97,68
26	Peningkatan jembatan Balun Sawahan Lr. 2 RT. 3 RW. 11 Kel. Balun Kec. Cepu	200.000.000	193.146.000	96,57
27	Pavingisasi jaling Dk. Sawahan Kel. Tempelan Kec. Blora	300.000.000	289.654.000	96,55
28	Pavingisasi jaling Dk. Kajangan Ds. Sonorejo Kec. Blora	2.945.000	2.945.000	100,00
29	Peningkatan jaling jl. A. Yani Lr. 1,2 dan 3 Kavling belakang GOR Mustika Blora Kel. Karangjati	200.000.000	195.198.000	97,60
30	Peningkatan jalan Mentul Indah RW.04 Kel. Karangboyo (Lanjutan)	250.000.000	247.796.000	99,12

31	Peningkatan jaling depan Kelurahan Karangboyo	200.000.000	195.643.000	97,82
32	Pembangunan drainase Kampung Baru RW.03 Kel. Karangboyo (Lanjutan)	162.000.000	151.229.000	93,35
33	Peningkatan jalan PKU - Megalrejo RW.13 - RW.14 Kel. Balun	150.000.000	148.169.000	98,78
34	Pavingisasi RT.01/RW.03 Kel. Kunduran Kec. Kunduran (Lanjutan)	500.000.000	484.231.000	96,85
35	Pemeliharaan jalan paving RT.03 RW.03 Kel. Karangboyo	75.000.000	68.721.000	91,63
36	Pavingisasi dan drainase RW.09 Kel. Cepu	201.400.000	189.127.000	93,91
37	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Randublatung	189.000.000	178.785.000	94,60
38	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Cepu	160.000.000	154.279.000	96,42
39	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Karangboyo	538.000.000	516.001.000	95,91
40	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Jepon	200.000.000	194.264.000	97,13
41	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Beran	931.000.000	811.242.000	87,14
42	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Bangkle	1.083.500.000	980.887.000	90,53
43	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kedungjener	200.000.000	193.580.000	96,79
44	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Mlangsen	70.000.000	67.662.000	96,66
45	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tambahrejo	700.000.000	652.312.000	93,19
46	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kauman	196.000.000	192.209.000	98,07
47	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Sonorejo	196.005.000	189.749.000	96,81
48	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tempelan	625.000.000	569.849.000	91,18
I	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	70.000.000	65.440.000	93,49
J	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			
1	Pemeliharaan ruang terbuka hijau	2.609.400.000	2.457.311.250	94,17
2	Perbaikan taman tugu batas kota	1.175.000.000	1.159.792.500	98,71
3	Perbaikan Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu	2.162.000.000	2.144.437.700	99,19
4	Pembangunan Lapangan Basket dan Estetika Lingkungan Taman	376.000.000	370.112.000	98,43

	Aryo Jipang Cepu (Selatan Terminal Cepu)			
5	Penataan Lapangan Golf Blora	31.350.000	0,00	0,00
K	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			
1	Pembangunan Pagar makam Bangkle	188.000.000	186.493.400	99,20
2	Pembangunan Pagar Makam Singo Lodro Kel. Mlangsen	94.000.000	93.179.300	99,13
L	Program Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendampingnya			
1	Pembangunan Draiase Kel. Kauman Kec. Blora	2.850.000.000	2.832.000.000	99,37
2	Pembangunan Drainase kel. Kunden Kec. Blora	1.000.000.000	921.857.000	92,19
3	Pembangunan Trotoar Pertigaan Pom Bensin - Bravo Kec. Cepu	2.500.000.000	2.463.102.000	98,52
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Jetis kec. Blora	1.000.000.000	998.000.000	99,80
M	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU)	1.427.700.000	1.336.078.500	93,58
2	Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum (PJU)	4.780.000.000	4.706.165.433	98,46
3	Meterisasi PJU Rayon PLN Cepu	282.000.000	263.872.700	93,57
4	Meterisasi PJU Rayon PLN Blora	282.000.000	266.380.400	94,46
5	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Todanan	238.000.000	235.779.400	99,07
6	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Banjarejo	188.000.000	183.647.400	97,68
7	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kunduran	338.000.000	330.620.800	97,82
8	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Ngawen	188.000.000	183.953.100	97,85
9	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jajah	188.000.000	183.160.500	97,43
10	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kedungtuban	94.000.000	90.969.000	96,78
11	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jati	188.000.000	183.714.800	97,72
12	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Randublatung	188.000.000	182.459.000	97,05
13	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Bogorejo	258.000.000	252.838.400	98,00
14	Pemeliharaan Jaringan PJU se-Kabupaten Blora dan Pemeliharaan Lampu Higmass serta Lampu Jembatan	188.000.000	187.392.100	99,68
15	Pengadaan Lampu PJU	188.000.000	187.649.300	99,81

	Cadangan (Wilayah I dan II)Kecamatan Bogorejo			
16	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Blora	2.038.500.000	1.977.539.120	97,01
17	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Tunjungan	188.000.000	184.783.300	98,29
18	Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah I	100.000.000	97.826.500	97,83
19	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Cepu	396.000.000	392.259.700	99,06
20	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Sambong	188.000.000	183.135.200	97,41
21	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Kradenan	188.000.000	182.777.000	97,22
22	Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah II	94.000.000	92.692.000	98,61
23	Penggantian Lampu LED Jl. Ahmad Yani dan Jl. Dr. Sutomo	940.000.000	902.295.000	95,99
N	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
1	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	240.000.000	136.530.000	56,89
2	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	20.000.000	0,00	0,00
3	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	18.800.000	10.300.000	54,79
4	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	37.400.000	33.686.000	90,07
O	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	226.800.000	219.302.500	96,69
2	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas	166.200.000	129.067.200	77,66
P	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	250.000.000	248.275.000	99,31
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	96.600.000	79.094.438	81,88
3	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan	42.900.000	42.871.000	99,93
4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	18.800.000	18.800.000	100,00
5	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	20.000.000	19.958.000	99,79
6	Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	15.000.000	15.000.000	100,00

7	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	10.000.000	8.890.000	88,90
8	Analisis database pelayanan parkir	15.000.000	14.360.000	95,73
9	Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	138.500.000	133.857.500	96,65
Q	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	324.300.000	320.417.000	98,80
2	Pengadaan marka jalan	282.000.000	262.000.000	92,91
R	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			
1	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	23.500.000	5.225.000	22,23
S	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			
1	Peningkatan Jaling Perumda Kunden Kel. Kunden Kec. Blora	940.000.000	915.784.000	97,42
T	Program Bidang Pekerjaan Umum Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendampingnya			
1	DDUB RUSUNAWA	470.000.000	417.908.102	88,92
2	Penyediaan Dana Operasional (BOP) dan Pendampingan PAMSIMAS	140.000.000	127.186.886	90,85
3	Sanitasi Kel. Kauman Kec. Blora	331.700.000	331.700.000	100,00
4	Sanitasi Kel. Beran Kec. Blora	331.900.000	331.900.000	100,00
5	Sanitasi Kel. Bangkle Kec. Blora	331.700.000	331.700.000	100,00
6	Biaya Penunjang Kegiatan Sanitasi	87.300.000	84.000.000	96,22
7	Pembangunan Drainase/Talud Jalan Bhayangkara	500.000.000	496.000.000	99,20
8	Peningkatan Jalan Kelurahan kunduran kecamatan Kunduran Kab. Blora	800.000.000	764.569.000	95,57
9	Pemeliharaan Jalan/Drainase jl. Gg. Amarta Komplek Balun Graha kel. Balun kec. Cepu	152.908.600	0,00	0,00
U	Program Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Dana Pendampingnya			
1	PAB Kelurahan Punggursugih Kec. Ngawen	374.000.000	369.171.000	98,71
2	PAB Kelurahan Kunduran Kec. Kunduran	374.000.000	369.084.000	98,69
3	PAB Kelurahan Wulung Kec. Randublatung	374.000.000	369.084.000	98,69
4	PAB Kelurahan Tambakromo Kec. Cepu	374.500.000	367.300.000	98,08
5	PAB Kelurahan Balun Kec. Cepu	374.000.000	368.945.000	98,65
6	PAB Kelurahan Ngelo Kec. Cepu	374.000.000	366.812.000	98,08

7	PAB Kelurahan Ngroto Kec. Cepu	374.000.000	368.874.000	98,63
8	PAB Kelurahan Karangboyo Kec. Cepu	374.000.000	369.160.000	98,71
9	Sanitasi Kel. Ngawen Kec. Ngawen	331.700.000	331.700.000	100,00
10	Sanitasi Kel. Kunduran Kec. Kunduran	331.700.000	331.700.000	100,00
11	Pembangunan PAB Kel. Tambahrejo kec. Blora	388.500.000	384.951.000	99,09
12	Pembangunan PAB Kel. Bangkle Kec. Blora	388.500.000	383.658.000	98,75
13	Pembangunan PAB Kel. Beran Kec. Blora	388.700.000	383.933.000	98,77
14	Pembangunan PAB Kel. Sonorejo Kec. Blora	388.500.000	383.614.000	98,74
15	Biaya Penunjang	239.300.000	221.481.700	92,55
V	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	45.000.000	20.103.500	44,67
2	Peningkatan Jalan RT. 07 RW. 05 Kel. Jepon Kec. Jepon	1.050.000	1.050.000	100,00
3	Rehabilitasi Trotoar Jl. Gunung Lawu Kec. Blora	1.410.000.000	1.374.587.000	97,49
4	Rehabilitasi Trotoar/Drainase Jl. KH. Ahmad Dahlan Kec. Blora	700.000.000	685.884.000	97,98
5	Rehabilitasi Trotoar Jl. Ngareng Kec. Cepu)	950.000.000	935.738.000	98,50
6	Pemeliharaan Jaling/Drainase Kel. Karangjati Kec. Blora	670.000.000	643.798.000	96,09
7	Pemeliharaan Jaling/Drainase Lingkungan Kel. Mlangsen Kec. Blora	470.000.000	450.096.000	95,77
8	Rehabilitasi Trotoar Jl. Diponegoro Utara Kec. Cepu	1.830.000.000	1.813.449.000	99,10
9	Drainase Jl. Gajah Mada	366.600.000	331.204.000	90,34
10	Rehabilitasi Masjid Agung Baitunnur Blora	5.700.000.000	5.501.605.000	96,52
11	Pembuatan DED Gedung Sasana Bhakti Blora	50.000.000	675.000	1,35
12	Pembangunan Trotoar Jl. Gunung Sumbing	1.100.000.000	991.124.000	90,10
13	Pembangunan Trotoar Jl. Gunung Sindoro	1.350.000.000	1.299.921.000	96,29
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	1.094.148.200	1.037.407.000	94,81
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Bangkle	470.000.000	455.696.000	96,96
16	BOP Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	25.000.000	24.680.000	98,72
17	Rehabilitasi Trotoar Jl. Raya Cepu	1.130.000.000	1.110.169.000	98,25
18	Rehabilitasi Trotoar Jl. Surabaya Cepu	470.000.000	455.417.000	96,90
19	Rehabilitasi Trotoar Jl.	1.410.000.000	1.390.373.000	98,61

	Pemuda Cepu		0	
20	Rehabilitasi Drainase Pasar Induk Cepu sampai Tuk Buntung kelurahan Balun	1.690.000.000	1.652.717.000	97,79
21	Pembangunan Trotoar Jalan Rajawali (Lanjutan)	470.000.000	452.342.000	96,24
22	Pembangunan trotoar/Drainase Jl. Tentara Pelajar	1.410.000.000	1.351.105.000	95,82
23	Pembangunan Jalan Lingkungan Puskesmas Randublatung	282.000.000	269.735.000	95,65
24	Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Jepon Kec. Jepon	1.910.000.000	1.877.100.000	98,28
25	Peningkatan Jalan Lingkungan/Drainase Sitimulyo RT. 10 RW. II Kel. Cepu Kec. Cepu	470.000.000	457.623.000	97,37
26	Peningkatan Jalan Lingkungan Karangboyo s.d Dukuh Sambongan Kel. Karangboyo Kec. Cepu	470.000.000	460.247.000	97,92
27	Pembangunan Drainase, Talud RW. III Kel. Jepon Kec. Jepon	400.000.000	388.172.000	97,04
28	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paving dan Talud) RW. II Kel. Jepon Kec. Jepon	400.000.000	384.295.000	96,07
29	Pembangunan Gedung Pemerintah dan Gedung Publik	1.500.000.000	1.453.588.000	96,91
30	Pembangunan Trotoar/ Drainase I	200.000.000	193.363.000	96,68
31	Pembangunan Trotoar/ Drainase II	159.000.000	154.192.000	96,98
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>83.594.607.600</b>	<b>80.467.299.453</b>	<b>96,26</b>

Sumber : DPA Perubahan dan LRA 2018 DINRUMKIMHUB Kab. Blora

## BAB IV

### IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat pemerintah daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan selanjutnya Laporan Keuangan OPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat Kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah.

#### 4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Lain-lain Yang Sah dengan nilai sebesar Rp 1.103.314.854,- Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 86.717.205.176,- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017  
(dalam Rupiah)

Uraian	2018			2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real. Thd Anggaran	Realisasi (Rp)
Pendapatan DINRUMKI MHUB	973.000.000	1.103.314.854	113,39	866.585.125



Belanja DINRUMKI MHUB	89.899.031.150	86.717.205.176	96,46	77.876.940.325
-----------------------------	----------------	----------------	-------	----------------

#### 4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2018 dan 2017. Jumlah Aset adalah sebesar Rp 237.797.449.154,74,- yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 188.825.112,- Aset Tetap sebesar Rp 209.917.425.070,91,- dan Aset lainnya sebesar Rp 27.691.198.971,83,- Sementara itu jumlah Jumlah Kewajiban sebesar Rp 545.005.807,- dan Ekuitas sebesar Rp 237.252.443.347,74,- sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Sebesar Rp 237.797.449.154,74,- sedangkan untuk tahun 2017 Jumlah Aset adalah sebesar Rp 193.236.276.913,30,- yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 183.182.019,- Aset Tetap sebesar Rp 165.299.886.170,72,- dan Aset lainnya sebesar Rp 27.753.208.723,58,- Sementara itu jumlah Jumlah Kewajiban sebesar Rp 485.695.900,- dan Ekuitas sebesar Rp 192.750.581.013,3,- sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Sebesar Rp 193.236.276.913,30,- Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2  
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Aset	237.797.449.153,74	193.236.276.913,30
Aset lancar	188.825.112,00	183.182.019,00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset tetap	209.917.425.069,91	165.299.886.170,72
Aset Lainnya	27.691.198.971,83	27.753.208.723,58
Kewajiban	545.005.807,00	485.695.900,00
Ekuitas	237.252.443.346,74	192.750.581.013,30
Kewajiban dan ekuitas	237.797.449.153,74	193.236.276.913,30

4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit dari operasi
- d. Kegiatan/Transfer non operasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit-LO

Laporan Operasional periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Ringkasan Laporan Perubahan Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
Kegiatan Operasional		-
Pendapatan LO	1.095.761.601,00	972.560.321,00
Beban	42.640.332.989,87	25.542.018.815,64
Surplus/Defisit dari Operasi	(41.544.571.388,87)	(24.569.458.494,64)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-
Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/Defisit LO	(41.544.571.388,87)	(24.569.458.494,64)

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menjelaskan perubahan ekuitas antar periode, serta menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- d. Ekuitas akhir.

Tabel 4.4.  
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Ekuitas Awal	192.750.581.013,30	-
Surplus /Defisit LO	(41.544.571.388,87)	(24.569.458.494,64)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	432.543.400,31	140.309.684.307,94
Ekuitas Akhir	151.638.553.024,74	115.740.225.813,30

#### 4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## BAB V

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Blora merupakan Entitas Pelaporan, yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan Organisasi Pemerintah Daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan OPD.

#### 5.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blora adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 5.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi

#### 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

##### ✓ Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.

##### ✓ Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui :

- a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
- b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.
- c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

##### ✓ Pengukuran

- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variabel.
- b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan

setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.

## 2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

### ✓ Definisi

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

### ✓ Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:
  - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
  - 2) konsumsi barang/ jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

### ✓ Pengukuran

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

### 3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

#### ✓ Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### ✓ Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### ✓ Pengukuran

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### 4. Kebijakan Akuntansi Aset

#### ✓ Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### ✓ Pengakuan

Aset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Blora;

#### ✓ Pengukuran

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya

### 5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

#### ✓ Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

✓ Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

✓ Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

✓ Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ Pengakuan

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.



## BAB VI

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 6.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Adapun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara rinci dilaporkan sebagai berikut :

##### A. REALISASI ANGGARAN

###### BELANJA

Anggaran	Rp 89.899.031.150,-
Realisasi	Rp 86.717.205.176,- (96,46 %)

###### A.1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran	Rp 6.304.423.550,-
Realisasi	Rp 6.249.905.723,- (99,14%)

###### A.2. Belanja Langsung :

Anggaran	Rp 83.594.607.600,-
Realisasi	Rp 80.467.299.453,- (96,26%)

###### ➤ Belanja Pegawai

Anggaran	Rp 1.517.281.000,-
Realisasi	Rp 1.458.799.600,- (96,15%)

###### ➤ Belanja Barang dan Jasa

Anggaran	Rp 10.876.982.500,-
Realisasi	Rp 10.187.570.533,- (93,66%)

###### ➤ Belanja Modal

Anggaran	Rp 71.200.344.100,-
Realisasi	Rp 68.820.929.320,- (96,66%)

##### B. PENGELUARAN BELANJA

###### B.1. Belanja Operasi

###### B.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 4.580.684.641,-
Tambahan Penghasilan	Rp 1.642.822.000,-
Insentif Pemungutan Retribusi	Rp 26.399.082,-
Honorarium PNS	Rp 324.820.000,-
Honorarium Non PNS	Rp 1.068.231.600,-
Uang Lembur	Rp 65.748.000,-

	JUMLAH		Rp	7.708.705.323,-
B.1.2.	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp		748.562.760,-
	Belanja Bahan/Material	Rp		532.914.600,-
	Belanja Jasa kantor	Rp		5.150.846.697,-
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp		191.573.826,-
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp		260.564.666,-
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp		5.676.196,-
	Belanja Makan dan Minum	Rp		266.686.600,-
	Belanja Pakaian Kerja	Rp		187.630.000,-
	Belanja Pakaian Khusus & Hari Tertentu	Rp		18.000.000,-
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp		549.726.288,-
	Belanja Pemeliharaan	Rp		1.773.016.900,-
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan BinteK	Rp		94.000.000,-
	Belanja Jasa Konsultasi	Rp		406.972.000,-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp		1.400.000,-
	JUMLAH		Rp	10.187.570.533,-
B.2.	Belanja Modal			
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp		510.448.900,-
	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp		16.173.113.300,-
	Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp		52.137.367.120,-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp		0,-
	Belanja Aset Lainnya	Rp		0,-
	JUMLAH		Rp	68.820.929.320,-
C.	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp		1.103.314.854,-
	Jumlah pendapatan tersebut berasal dari			
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp		15.080.000,-
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	Rp		412.500.000,-

Umum

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	342.171.300,-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	3.750.000,-
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp	88.840.000,-
Retribusi Terminal	Rp	36.039.000,-
Retribusi Ijin Trayek	Rp	3.792.000,-
Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios	Rp	2.000.000,-
Pendapatan dari Sewa Rusunawa	Rp	199.142.554,-

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
973.000.000	1.103.314.854	866.585.125

Saldo akhir Pendapatan Asli Daerah yang diterima DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.103.314.854,00,- yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Retribusi Jasa Umum	740.000.000,00	769.751.300,00	718.098.600,00
- Retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan umum	375.000.000,00	412.500.000,00	371.196.500,00
- Retribusi pengujian kendaraan Bermotor	350.000.000,00	342.171.300,00	333.232.100,00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000,00	15.080.000,00	13.670.000,00
b. Retribusi Jasa Usaha	63.000.000,00	128.629.000,00	60.909.800,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	3.750.000,00	0,00
- Retribusi pasar grosir/pertokoan	27.000.000,00	88.840.000,00	26.899.800,00
- Retribusi terminal	36.000.000,00	36.039.000,00	34.010.000,00
c. Retribusi Perijinan Tertentu	10.000.000,00	3.792.000,00	8.024.000,00
- Retribusi ijin trayek	10.000.000,00	3.792.000,00	8.024.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	160.000.000,00	201.142.554,00	79.552.725,00
- Pend. atas Penjualan Angsuran Kios	0,00	2.000.000,00	7.130.000,00
- Pendapatan dari Sewa Rusunawa	160.000.000,00	199.142.554,00	72.422.725

D. BELANJA

a.	BELANJA PEGAWAI	Rp	7.708.705.323,-
	Jumlah belanja pegawai tersebut merupakan belanja pegawai tidak langsung dan belanja pegawai langsung yang terdiri dari :		
a.1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp	4.580.684.641,-
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan tersebut terdiri dari :		
	- Gaji Pokok PNS	Rp	3.554.099.660,-
	- Tunjangan Keluarga	Rp	337.873.688,-
	- Tunjangan Jabatan	Rp	181.060.000,-
	- Tunjangan Fungsional Umum	Rp	168.372.500,-
	- Tunjangan Beras	Rp	209.112.750,-
	- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	Rp	2.300.619,-
	- Pembulatan Gaji	Rp	59.306,-
	- Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	100.526.208,-
	- Iuran asuransi kecelakaan kerja dan kematian	Rp	27.279.910,-
a.2.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp	1.642.822.000,-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp	1.642.822.000,-
a.3.	Insentif Pemungutan Retribusi	Rp	26.399.082,-
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp	26.399.082,-
a.4.	Honorarium PNS terdiri dari :	Rp	324.820.000,-
	- Honorarium Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan	Rp	108.275.000,-
	- Honorarium Tim Pengadaan Brg & Jasa	Rp	30.145.000,-
	- Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Rp	186.400.000,-
a.5.	Honorarium Non PNS	Rp	1.068.231.600,-
	Honorarium Non PNS terdiri dari :		

	- Honor Tenaga Kasar/harian lepas	Rp	367.610.000,-
	- Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap	Rp	369.306.000,-
	- Honorarium Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan Non PNS	Rp	84.000.000,-
a.6	Uang Lembur	Rp	65.748.000,-
	Uang Lembur PNS	Rp	61.810.000,-
	Uang Lembur Non PNS	Rp	3.938.000,-
b.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp	10.187.570.533,-
	Jumlah belanja barang dan jasa tersebut terdiri dari :		
b.1.	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	748.562.760,-
	Jumlah belanja bahan pakai habis tersebut terdiri dari :		
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp	285.390.960,-
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	122.645.800,-
	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp	2.340.000,-
	- Belanja Spanduk	Rp	21.200.000,-
	- Belanja Piala Trofi dan Hadiah dalam Bentuk Barang lainnya	Rp	490.000,-
	- Belanja Peralt. Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	31.576.500,-
	- Belanja Barang Peralt. dan Perlengk. U Kantor tdk memenuhi kapitalisasi	Rp	215.588.000,-
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronika	Rp	42.430.200,-
	- Belanja Barang Kebutuhan Peserta Diklat/Sosialisasi	Rp	6.000.000,-
	- Belanja Baliho/Banner	Rp	3.000.000,-
	- Belanja pupuk dan pembasmi hama	Rp	7.901.300,-
	- Belanja kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	Rp	10.000.000,-
	-		

b.2.	Belanja Bahan/Material Jumlah belanja bahan/material tersebut terdiri dari :	Rp	532.914.600,-
	- Belanja Bahan Baku Bangunan	Rp	335.806.300,-
	- Belanja Bahan/Bibit Tanaman	Rp	188.808.300,-
	- Belanja suku cadang peralatan dan perlengkapan lainnya	Rp	8.300.000,-
b.3.	Belanja Jasa Kantor Merupakan belanja untuk keperluan jasa kantor dengan rincian sebagai berikut :	Rp	5.150.846.697,-
	- Belanja Telepon	Rp	3.620.667,-
	- Belanja Air	Rp	21.734.800,-
	- Belanja listrik	Rp	5.090.058.799,-
	- Belanja Kawat/faksimili/internet	Rp	23.522.431,-
	- Belanja Surat kabar/majalah	Rp	9.910.000,-
	- Belanja jasa dokumentasi	Rp	2.000.000,-
b.4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Jumlah belanja perawatan kendaraan bermotor tersebut terdiri dari :	Rp	191.573.826,-
	- Belanja jasa service	Rp	59.403.651,-
	- Belanja penggantian suku cadang	Rp	100.204.950,-
	- Belanja pelumas	Rp	8.633.000,-
	- Belanja Jasa KIR	Rp	44.400,-
	- Belanja STNK	Rp	23.287.825,-
b.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan Jumlah belanja cetak dan penggandaan tersebut terdiri dari :	Rp	260.564.666,-
	- Belanja Cetak	Rp	214.139.250,-
	- Belanja Penggandaan	Rp	46.425.416,-
b.6.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir Jumlah belanja sewa rumah /gedung /	Rp	5.676.196,-

	gudang/parkir tersebut terdiri dari :	
	- Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp 3.500.000,-
	- Belanja Sewa Kamar/Penginapan	Rp 2.176.196,-
b.7.	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 266.686.600,-
	Jumlah belanja makanan dan minuman tersebut merupakan belanja makanan dan minuman untuk :	
	- Bel makan & minum harian pegawai	Rp 91.941.600,-
	- Bel makan & minum rapat	Rp 37.995.000,-
	- Bel makan & minum kegiatan	136.750.000,-
b.8.	Belanja Pakaian Kerja	Rp 187.630.000,-
	Jumlah belanja pakaian kerja DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora merupakan :	
	- Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Rp 187.630.000,-
b.9.	Belanja Pakaian Khusus & Hari-Hari Tertentu	Rp 18.000.000,-
	- Belanja Pakaian Adat Daerah	Rp 18.000.000,-
b.10.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 549.726.288,-
	Jumlah belanja perjalanan dinas tersebut terdiri dari :	
	- Bel Perjalanan dinas dalam daerah	Rp 292.241.700,-
	- Bel Perjalanan dinas luar daerah	Rp 257.484.588,-
b.11.	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.773.016.900,-
	Jumlah belanja pemeliharaan tersebut terdiri dari :	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp 262.000.000,-
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp 23.500.000,-
	- Belanja Pemeliharaan Mebeler	Rp 17.300.000,-
	- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat	Rp 11.959.500,-

	Berat			
	- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel	Rp	98.010.000,-	
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik & Telepon	Rp	1.360.247.400,-	
b.12.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi	Rp	94.000.000,-	
	Jumlah belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek tersebut merupakan belanja untuk :			
	- Belanja kursus singkat/pelatihan	Rp	94.000.000,-	
b.13.	Belanja Jasa Konsultasi	Rp	406.972.000,-	
	Jumlah Belanja Jasa Konsultasi tersebut merupakan belanja untuk :			
	- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	Rp	171.667.000,-	
	- Belanja jasa konsultansi perencanaan kegiatan non fisik	Rp	208.220.000,-	
	- Belanja jasa konsultansi pengawasan kegiatan non fisik	Rp	27.085.000,-	
b.14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp	1.400.000,-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp	1.400.000,-	
C.	BELANJA MODAL	Rp	68.820.929.320,-	
	Jumlah belanja modal tersebut terdiri dari :			
c.1.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	510.448.900,-	
	Merupakan belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, peralatan kantor, mebeler, komputer, alat-alat studio, alat-alat bengkel, peralatan dapur, dan alat-alat persenjataan/			



keamanan, alat-alat studio, dan alat-alat ukur dengan rincian sebagai berikut :

- Bel. Modal Pengadaan Mesin Las	Rp	6.500.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Rp	4.000.000,-
- Bel. Modal Pengadaan AC	Rp	59.796.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Kipas Angin	Rp	814.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Almari	Rp	5.940.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Mimbar/ Podium	Rp	2.475.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Komputer Notebook	Rp	11.990.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Printer	Rp	7.986.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Meja Rapat	Rp	93.456.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Kursi Kerja	Rp	1.765.500,-
- Bel. Modal Pengadaan Kursi Rapat	Rp	41.580.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	Rp	17.578.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Meja Rias	Rp	1.485.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Kursi Tamu	Rp	23.958.000,-
- Bel. Modal Meja Resepsionis	Rp	18.535.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	Rp	1.100.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Gorden	Rp	139.726.400,-
- Bel. Modal Pengadaan TV	Rp	10.989.000,-
- Bel. Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	Rp	60.775.000,-
 c.2. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	16.173.113.300,-
Merupakan belanja modal pengadaan kontruksi / pembelian bangunan, rehabilitasi/pemeliharaan bangunan yang dikapitalisasi		
- Bel. Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Sarana Umum Taman	Rp	5.006.074.800,-
- Bel. Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Pertemuan	Rp	1.877.100.000,-

-	Belanja Modal Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor yg Dikapitalisasi	Rp	3.508.660.800,-
-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Makam	Rp	279.672.700,-
-	Bel. Modal Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Umum Ibadah yg Dikapitalisasi	Rp	5.501.605.000,-
c.3.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang terdiri dari	Rp	52.137.367.120,-
-	Bel. Modal Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas	Rp	79.667.000,-
-	Bel.Modal Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)	Rp	255.755.000,-
-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	Rp	15.135.107.000,-
-	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	Rp	6.557.594.000,-
-	Belanja modal rehabilitasi/ pemeliharaan konstruksi jalan yang dikapitalisasi	Rp	3.660.219.000,-
-	Belanja modal rehabilitasi/ pemeliharaan konstruksi trotoar yang dikapitalisasi	Rp	8.113.172.000,-
-	Belanja modal rehabilitasi/ pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang yang dikapitalisasi	Rp	193.146.000,-
-	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	Rp	4.484.586.000,-
-	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	Rp	5.620.587.000,-
-	Belanja modal pengadaan	Rp	1.658.700.000,-

- konstruksi instalasi pengolahan air limbah
- Belanja modal pengadaan instalasi listrik Rp 6.367.834.120,-
  - Belanja modal pengadaan jaringan listrik Rp 11.000.000,-

Dari uraian tersebut di atas dapat diringkas dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Anggaran Belanja Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
89.899.031.150,00	86.717.205.176,00	77.876.940.325,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah total Belanja DINRUMKIMHUB, yang terdiri dari :

Belanja Operasi

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
18.698.687.050,00	17.896.275.856,00	11.618.907.225,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

Belanja Pegawai

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
7.821.704.550,00	7.708.705.323,00	3.620.676.392,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Gaji dan Tunjangan	4.604.500.000,00	4.580.684.641,00	1.767.802.425,00
b. Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	1.651.400.000,00	1.642.822.000,00	766.146.800,00
c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	48.523.550,00	26.399.082,00	31.867.167,00
d. Honorarium PNS	372.370.000,00	324.820.000,00	235.630.000,00
e. Honorarium Non PNS	1.079.106.000,00	1.068.231.600,00	802.310.000,00
f. Uang Lembur	65.805.000,00	65.748.000,00	16.920.000,00

## Belanja Barang

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017
10.876.982.500,00	10.187.570.533,00	7.998.230.833,00

Belanja barang yang terealisasi sebesar Rp 10.187.570.533,00 pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja Bahan Pakai Habis	918.264.200,00	748.562.760,00	414.524.462,00
b. Belanja Bahan/Material	533.710.300,00	532.914.600,00	546.933.400,00
c. Belanja Jasa Kantor	5.305.980.000,00	5.150.846.697,00	4.440.641.849,00
d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	239.481.000,00	191.573.826,00	149.595.513,00
e. Belanja Cetak dan Penggandaan	282.769.200,00	260.564.666,00	243.867.411,00
f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.300.000,00	5.676.196,00	3.000.000,00
g. Belanja Makanan dan Minuman	287.075.000,00	266.686.600,00	78.161.154,00
h. Belanja Pakaian Kerja	187.880.000,00	187.630.000,00	125.486.650,00
i. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
j. Belanja Perjalanan Dinas	647.260.000,00	549.726.288,00	475.018.974,00
k. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	119.000.000,00	94.000.000,00	26.500.000,00
l. Belanja Pemeliharaan	1.834.245.800,00	1.773.016.900,00	1.048.435.720,00
m. Belanja Jasa Konsultansi	494.617.000,00	406.972.000,00	446.065.700,00
n. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

## Belanja Modal

Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
71.200.344.100,00	68.820.929.320,00	66.258.033.100,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

## 1. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
512.069.000,00	510.448.900,00	986.188.600,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran setelah perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	8.415.000,00	12.000.000,00
b. Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.976.000,00	61.700.000,00
c. Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	10.989.000,00	69.311.400,00
d. Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	719.664.000,00
e. Pengadaan Mebeler	199.035.000,00	198.357.500,00	95.018.000,00
f. Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian & Peternakan	0,00	0,00	20.495.200,00
g. Pengadaan Alat-Alat Bengkel	10.500.000,00	10.500.000,00	8.000.000,00
h. Pengadaan Peralatan Kantor	60.815.000,00	60.610.000,00	0,00
i. Pengadaan Peralatan Dapur	1.119.000,00	1.100.000,00	0,00
j. Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	140.100.000,00	139.726.400,00	0,00
k. Pengadaan Alat-Alat Ukur	61.000.000,00	60.775.000,00	0,00

## 2. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
16.586.218.300,00	16.173.113.300,00	12.013.316.500,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja modal Rehabilitasi/Pemel. Gedung Kantor yg Dikapitalisasi	3.607.880.800,00	3.508.660.800,00	1.571.110.100,00
b. Belanja modal Pengadaan Konst/ Pembelian Gedung Kantor	0,00	0,00	3.831.878.900,00
c. Belanja Modal Pengadaan Konst/ Pembelian Bangunan Pertokoan	0,00	0,00	555.744.000,00
d. Belanja Modal Pengadaan Konstr/ Pembelian Sarana Umum Taman	5.086.337.500,00	5.006.074.800,00	5.388.312.500,00

e. Belanja Modal Rehabilitasi/Pemel. Bangunan Terminal yg Dikapitalisasi	0,00	0,00	478.181.000,00
f. Belanja Modal Pengad. Konstruksi/ Pembelian Shelter	0,00	0,00	93.590.000,00
g. Belanja Modal Pengad. Konstruksi Jalan – Pengad. Pagar Pengaman Jalan	0,00	0,00	94.500.000,00
h. Belanja modal Rehabilitasi/Pemel. Sarana Umum Ibadah yg Dikapitalisasi	5.700.000.000,00	5.501.605.000,00	0,00
i. Belanja Modal Pengadaan Konst/ Pembelian Gedung Pertemuan	1.910.000.000,00	1.877.100.000,00	0,00
j. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Makam	282.000.000,00	279.672.700,00	0,00

### 3. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
54.002.056.800,00	52.137.367.120,00	53.258.528.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja Modal Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas	81.400.000,00	79.667.000,00	58.300.000,00
b. Belanja Modal Pengadaan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	257.000.000,00	255.755.000,00	396.858.000,00
c. Belanja Modal Pengad. Konstruksi Jalan	16.004.808.600,00	15.135.107.000,00	3.205.557.700,00
d. Belanja Modal rehabilitasi/ pemel. konstruksi jalan yang dikapitalisasi	3.790.348.200,00	3.660.219.000,00	28.255.663.950,00
e. Belanja Modal rehabilitasi/ pemel. konstruksi trotoar yang	8.259.000.000,00	8.113.172.000,00	5.285.232.150,00

dikapitalisasi			
f. Belanja modal rehabilitasi/ pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang yang dikapitalisasi	200.000.000,00	193.146.000,00	92.517.800,00
g. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	4.546.700.000,00	4.484.586.000,00	3.471.359.000,00
i. Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	5.804.600.000,00	5.620.587.000,00	2.563.693.500,00
j. Belanja modal pengadaan konst tulap/talud/ bronjong	0,00	0,00	1.266.968.800,00
k. Belanja modal pengadaan konstruksi instalasi pengolahan air limbah	1.658.700.000,00	1.658.700.000,00	3.150.000.000,00
l. Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6.558.500.000,00	6.367.834.120,00	5.512.377.100,00
m. Belanja Modal Pengad. Jaringan Listrik	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
n. Belanja Modal Pengad. Konstruksi Trotoar	6.830.000.000,00	6.557.594.000,00	0,00

## 6.2. Penjelasan Laporan Neraca

a. Aset Lancar		
a.1. Kas di Bendahara Penerimaan:	Rp	15.850.000,-
a.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,-
a.3. Persediaan	Rp	76.222.264,-
Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan yang dimiliki DINRUMKIMHUB Kab.Blora per tanggal 31 Desember 2018		
- Barang Cetak	Rp	76.222.264,-

a.4.	Piutang	Rp	96.752.848,-
	Jumlah tersebut merupakan piutang penjualan angsuran kios per tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 19.480.000,- tetapi karena semuanya dimasukkan sebagai Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Kios maka jumlah Piutang Penjualan Angsuran Kios DINRUMKIMHUB adalah sebesar Rp 0,- , Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp 48.352.500,- tetapi karena Penyisihan Piutangnya 100% maka jumlah Piutangnya menjadi Rp 0,- dan Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp 97.239.043,- dan Penyisihan Piutangnya sebesar Rp 486.195,-		
	- Piutang Retribusi Pelay.Parkir Tepi Jalan Umum	Rp	48.352.500,-
	- Penyisihan Piutang Retribusi Pelay. Parkir Tepi Jalan Umum	Rp	(48.352.500,-)
	- Piutang Penjualan Angsuran Kios	Rp	19.480.000,-
	- Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Kios	Rp	(19.480.000,-)
	- Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa	Rp	97.239.043,-
	- Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa	Rp	( 486.195,-)
	Jumlah Aset Lancar	Rp	188.825.112,-
b.	Aset Tetap		
b.1.	Tanah	Rp	4.905.020.690,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang ditempati oleh DINRUMKIMHUB Kab. Blora per tanggal 31 Desember 2018 berupa		
	- Tanah Kantor	Rp	1.175.500.000,-
	- Tanah Sarana Umum Terminal	Rp	3.467.073.000,-
	- Tanah Perkampungan	Rp	60.000.000,-
	- Tanah Makam	Rp	202.447.690,-



b.2.	Peralatan dan Mesin	Rp	13.740.891.601,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai barang bergerak yang dimiliki oleh DINRUMKIMHUB Kab. Blora per tanggal 31 Desember 2018.		
	- Alat-alat Berat	Rp	39.435.000,-
	- Alat-alat Angkutan	Rp	4.015.838.133,-
	- Alat-alat Bengkel	Rp	640.899.900,-
	- Alat Pengolah Pertanian&Peternakan	Rp	1.925.000,-
	- Peralatan Kantor	Rp	70.554.000,-
	- Perlengkapan Kantor	Rp	328.320.200,-
	- Komputer	Rp	1.014.564.655,-
	- Meubelair	Rp	564.960.250,-
	- Peralatan Dapur	Rp	71.256.100,-
	- Penghias Ruangan Rumah tangga	Rp	241.504.400,-
	- Alat-alat Studio	Rp	153.968.900,-
	- Alat Komunikasi	Rp	19.706.000,-
	- Alat-alat Ukur	Rp	2.591.842.813,-
	- Alat-alat Keamanan	Rp	3.986.116.250,-
b.3.	Gedung dan Bangunan	Rp	28.470.846.041,-
	Jumlah tersebut merupakan gedung dan bangunan berupa :		
	- Gedung Kantor	Rp	10.839.326.950,-
	- Bangunan Terminal	Rp	1.317.990.200,-
	- Bangunan Sarana Umum Ibadah	Rp	56.800.000,-
	- Gedung Pertemuan	Rp	732.250.000,-
	- Bangunan Shelter	Rp	224.200.400,-
	- Bangunan pagar/gapura/taman	Rp	570.099.456,-
	- Bangunan Sarana MCK	Rp	71.713.945,-
	- Bangunan Dermaga	Rp	9.494.100,-
	- Sarana Umum Taman	Rp	12.609.903.199,-
	- Bangunan Pertokoan	Rp	1.057.386.000,-
	- Bangunan Gedung Instalasi	Rp	558.578.091,-
	- Bangunan Sarana Makam	Rp	279.672.700,-
	- Bangunan Lainnya	Rp	143.431.000,-

b.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 216.974.453.261,48,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai yang terdiri dari :	
	- Sumur Pompa	Rp 123.437.900,-
	- Jaringan Listrik	Rp 15.498.967.726,-
	- Jalan	Rp 125.562.037.505,-
	- Trotoar	Rp 32.777.852.900,-
	- Jembatan Penyebrangan Orang	Rp 2.112.069.500,-
	- Jaringan Irigasi/Waduk/Bendungan	Rp 3.554.664.850,-
	- Jaringan Air Bersih/Minum	Rp 9.994.628.100,-
	- Kanal Permukaan	Rp 8.184.280.500,-
	- Tulap/Talud/Bronjong	Rp 1.266.968.800,-
	- Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Rp 4.808.700.000,-
	- Instalasi Listrik	Rp 9.317.316.720,-
	- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Rp 3.773.528.760,48
b.5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 545.955.650,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya berupa :	
	- Buku dan Kepustakaan	Rp 545.955.650,-
b.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 7.378.705.000,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai dari Pembangunan Gedung Serba Guna Rp 1.877.100.000,- dan Rehab Masjid Baitunur Rp 5.501.605.000,00	
	Jumlah Aset Tetap	Rp 272.015.872.243,48,-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp (62.098.447.173,57)
	Aset Tetap	Rp 209.917.425.069,91,-
c.	Aset Lainnya	
c.1.	Aset Tak Berwujud	Rp 172.452.500,-
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tak berwujud berupa program/software	Rp 172.452.500,-
	Akumulasi Amortisasi	Rp (68.981.000,-)

Aset Tak Berwujud	Rp	103.471.500,-
c.2. Aset Lain-Lain	Rp	28.522.694.307,-
<p>Jumlah tersebut merupakan nilai asset lain-lain yang berasal dari pengalihan aset dari Kominfo, ESDM, dan DPU, yaitu Aset Tanah dari Kominfo senilai Rp 25.523.107.000,- Aset Peralatan dan Mesin dari DPU senilai Rp 68.322.957,- Kominfo senilai Rp 114.351.000,- dan ESDM senilai Rp 12.482.000,- serta Aset Gedung dan Bangunan dari Kominfo senilai Rp 2.799.246.350,- dan Aset Tetap Lainnya dari Kominfo senilai Rp 5.185.000,-</p>		
- Aset Lain-Lain (Tanah)	Rp	25.523.107.000,-
- Aset Lain-Lain (Peralatan dan Mesin)	Rp	195.155.957,-
- Aset Lain-Lain (Gedung Bangunan)	Rp	2.799.246.350,-
- Aset Lain-Lain (Aset Tetap Lainnya)	Rp	5.185.000,-
Jumlah Aset Lain-Lain	Rp	28.522.694.307,-
Akumulasi Penyusutan (dari Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin dan Gedung Bangunan)	Rp	(934.966.835,17,-)
Aset Lain-lain	Rp	27.587.727.471,83,-
Jumlah Aset Lainnya	Rp	27.691.198.971,83,-
Jumlah Aset Tetap & Aset Lainnya	Rp	<u>237.608.624.041,74,-</u>
JUMLAH ASET	Rp	<u>237.797.449.153,74,-</u>
d. KEWAJIBAN		
d.1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	545.005.807,-
<p>Jumlah tersebut merupakan nilai Pendapatan Diterima dimuka dan Utang Jangka Pendek Lainnya</p>		
- Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	77.326.684,-
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	467.679.123,-

	Jumlah Kewajiban	Rp	545.005.807,-
e.	EKUITAS	Rp	237.252.443.346,74
	Jumlah tersebut merupakan nilai dari Ekuitas dan RK PPKD		
	- Ekuitas	Rp	151.638.553.024,74
	- RK PPKD	Rp	85.613.890.322,00
	Jumlah Ekuitas	Rp	237.252.443.346,74

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp 237.797.449.153,74

Pada akhir Tahun 2018 ini timbul Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 19.480.000,- Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 19.480.000,- tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 masuk dalam umur piutang sudah melebihi jatuh tempo lebih dari 5 tahun sehingga masuk dalam kategori Penyisihan Piutangnya 100% meskipun dalam kenyataannya masih ada pembayaran atau masih dapat ditagih pembayarannya. Khusus untuk yang Cepu karena tidak ada Surat Perjanjian Awal, diasumsikan jatuh temponya sama dengan yang ada di Ngawen, yaitu telah jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Untuk yang Ngawen yang Surat Perjanjian Awalnya ada jatuh tempo adalah tahun 2009 dan 2010, sedang untuk Cepu yang tidak ada Surat Perjanjian Awalnya diasumsikan juga telah jatuh tempo lebih dari 5 tahun karena jika dilihat kebelakang adanya Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios bersamaan waktunya. Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios pada awalnya timbul karena sesuai Surat Perjanjian Awal adalah Pemberian Hak Penggunaan Tempat Usaha atau Kios Pertokoan dengan membayar Harga Kios yang telah disepakati sesuai dalam Surat Perjanjian dengan cara membayar uang muka dan sisanya akan diangsur. Namun dalam kenyataannya sisa angsuran tersebut masih ada yang belum terbayar hingga saat ini. Piutang Pendapatan Penjualan Angsuran Kios ini pada awalnya merupakan Piutang dari Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora, yang pada akhir tahun 2016 terpecah menjadi beberapa OPD dan karena pendapatan penjualan angsuran kios tupoksinya masuk dalam Bidang Perhubungan maka pada tahun 2017 ini masuk menjadi Pendapatan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora dan yang belum terbayar akan menjadi Piutang Pendapatan Penjualan Kios Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan yang terbentuk pada akhir tahun 2016 dan memulai kegiatan sebagai OPD di tahun 2017 yang merupakan gabungan dari Pecahan DPPKKI

yaitu Bidang Perhubungan, dan pecahan dari PU yaitu Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Bidang Pertamanan dan Kelistrikan. Piutang Pendapatan Penjualan Angsuran Kios ini karena berasal dari DPPKKI, awalnya masih terdiri dari Piutang yang berasal dari UPTD Terminal Cepu dan UPTD Terminal Ngawen, sementara untuk UPTD Terminal Cepu saat ini sudah tidak berada dibawah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora karena sudah ikut Pusat, sedangkan yang ada sekarang hanya UPT Terminal dan Parkir, namun berdasarkan koreksi dari BPK Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios masih masuk dalam Dinrumkimhub. Pada akhir tahun 2017 Piutang Pendapatan Penjualan Angsuran Kios Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora sebesar Rp 21.480.000,- dan menjadi saldo awal Tahun 2018. Selama Tahun 2018 terdapat pembayaran Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 2.000.000,- Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios pada akhir tahun yang belum terbayar akan menjadi Piutang Pendapatan atas Angsuran Kios. Dengan demikian pada akhir Tahun 2018 di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora terdapat Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 19.480.000,- yang terdiri dari Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios Ngawen sebesar Rp 15.490.000,- dan Cepu sebesar Rp 3.990.000,- karena Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Kiosnya sebesar 100 % atau semuanya dimasukkan sebagai Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 19.480.000,- maka Piutang Penjualan Angsuran Kios DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora menjadi Rp 0,-

Selain Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios, berdasarkan koreksi BPK di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora juga terdapat Piutang Retribusi yang berasal dari limpahan DPPKKI Kabupaten Blora yang sudah bubar karena SOTK Baru, dan Tupoksinya ikut di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora, yaitu Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Piutang ini pada awalnya timbul karena pada saat pertama kali penerapan sistem akrual semua perjanjian kontrak dicatat sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sehingga timbul Piutang. Pada akhir tahun 2018 ini terdapat Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp 48.352.500,- yang terdiri dari Piutang yang berasal dari UPTD Blora sebesar Rp 9.918.500,- dan UPTD Cepu sebesar Rp 38.434.000,- sedangkan kedua UPTD tersebut sekarang sudah tidak masuk di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora tetapi untuk UPTD Cepu sudah ikut Pusat dan UPTD Blora ikut Provinsi. Untuk Piutang Retribusi Pelayanan Parkir

Tepi Jalan Umum ini dikarenakan sudah berumur lebih dari satu tahun maka penyisihan piutang retribusinya juga sebesar 100% atau semuanya dimasukkan sebagai penyisihan piutang sebesar Rp 48.352.500,- sehingga Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora menjadi Rp 0,-

Selain Piutang Penjualan Angsuran Kios di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora juga terdapat Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa yaitu sebesar Rp 97.239.043,- Piutang ini timbul karena untuk Pendapatan Sewa Rusunawa ada Surat Perjanjian Kontrak selama 3 (Tiga) Tahun dari para Penyewa Rusunawa yang menjadi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pada akhir Tahun 2018 masih ada yang belum terealisasi sehingga menjadi Piutang. Selain dari sewa yang belum terbayar Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa juga berasal dari Biaya Listrik, Biaya PAM, dan Denda Sewa yang belum terbayar. Pada Tahun 2018 untuk Pendapatan Sewa Rusunawa terdapat Perjanjian Kontrak yang diinput menjadi SKRD untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) Tahun sebesar Rp 80.100.000,- Ditambah sisa Piutang Sewa yang lama sebesar Rp 100.487.500,- Pada Tahun 2018 SKRD dari Pendapatan Rusunawa ini terealisasi sebesar Rp 18.050.000,- sehingga masih terdapat Piutang sebesar Rp 62.050.000,- Sedangkan Piutang yang lama terealisasi sebesar Rp 58.400.000,- sehingga masih Rp 42.087.500,- Jadi Total Piutang Sewa menjadi Rp 104.137.500,- Dari Piutang tersebut ada koreksi dikarenakan adanya Penyewa Rusunawa yang keluar dari Rusunawa dan baru masuk tahun ini atau SKRD baru terinput tahun ini. Untuk penyewa yang keluar dari Rusunawa mengakibatkan pengurangan piutang sehingga dilakukan koreksi sebesar Rp 6.375.000,- Dengan demikian Piutang Sewa menjadi sebesar Rp 97.762.500,- Dan untuk penyewa yang pindah tidak dilakukan koreksi SKRD karena sudah tercatat sebagai piutang tahun lalu. Sedangkan Piutang Listrik, pada awal Tahun 2018 sebesar Rp 3.011.796,- selama Tahun 2018 terdapat tagihan listrik sebesar Rp 59.515.445,5 dan pembayaran sebesar Rp 63.432.398,6 sehingga pada akhir tahun 2018 terdapat Piutang Listrik sebesar sebesar Rp (905.157,-), Piutang PAM awal tahun 2018 sebesar Rp 743.600,- selama tahun 2018 terdapat tagihan PAM sebesar Rp 18.167.500,- dan pembayaran sebesar Rp 19.077.400,- sehingga pada akhir tahun terdapat Piutang PAM sebesar Rp (166.300,-), dan Piutang Denda awal tahun 2018 sebesar Rp 532.500,- selama tahun 2018 terdapat tagihan denda sebesar Rp 6.013.000,- dan pembayaran sebesar Rp 5.997.500,- sehingga pada akhir tahun 2018 terdapat Piutang Denda Sewa Rusunawa sebesar Rp 548.000,- Dengan demikian pada akhir Tahun 2018

di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora terdapat Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa yang sebesar Rp 97.239.043,- Untuk Piutang Retribusi ini sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 masuk dalam umur piutang 0-1 bulan sehingga penyisihan piutangnya 0,5% sehingga pada akhir tahun 2018 ada Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp 486.195,- Dengan demikian di Neraca DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora terdapat Penyisihan Piutang sebesar Rp 68.318.695,- yang terdiri dari Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp 48.352.500,- Penyisihan Piutang Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 19.480.000,- dan Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp 486.195,-

#### Pengungkapan atas Pos-Pos Aset

Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (DINRUMKIMHUB) Kabupaten Blora merupakan Dinas Baru yang baru terbentuk pada akhir Tahun 2016 ini karena adanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Baru akhir Tahun 2016. DINRUMKIMHUB merupakan gabungan dari pecahan 2 (dua) dinas yaitu Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi, dan Informatika yaitu Bidang Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum yaitu Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Bidang Kelistrikan dan Pertamanan. Dengan demikian karena DINRUMKIMHUB merupakan gabungan dari pecahan dua dinas tersebut maka pada akhir Tahun 2018 ini yang menjadi dasar pembuatan neraca DINRUMKIMHUB, khususnya untuk pos aset adalah merupakan gabungan pengalihan aset dari dua dinas tersebut ditambah aset dari Dinas ESDM dan penambahan aset selama Tahun 2018 atau Neraca DINRUMKIMHUB tahun 2017 menjadi saldo awal Neraca Tahun 2018.

Untuk pos-pos aset yang menjadi Neraca Awal DINRUMKIMHUB sebelum pengadaan Tahun 2018 jumlah aset adalah sebesar Rp 193.236.276.913,3,- yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp 183.182.019,- berupa Persediaan yaitu berupa Persediaan Barang Cetakan sebesar Rp 57.140.500,- dan,- Piutang Lainnya sebesar Rp 126.255.396,- yaitu Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 21.480.000,- Penyisihan Piutang sebesar Rp (21.480.000,-) dan Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp 104.775.396,- dengan Penyisihan Piutang Sewa Rusunawa sebesar Rp 523.877,- dan Aset Tetap sebesar Rp 165.299.886.170,72,- serta Aset Lainnya sebesar Rp 27.753.208.723,58,- Untuk Aset Tetap terdiri dari Tanah

sebesar Rp 4.905.020.690,- Peralatan dan Mesin sebesar Rp 12.185.851.101,- Gedung dan Bangunan sebesar Rp 21.042.284.742,- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 168.847.722.141,48,- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 545.955.650,- dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (42.226.948.153,76.-) sedangkan Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp 172.452.500,- dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp (34.490.500,-) dan Aset Lain-Lain sebesar Rp 28.522.694.307,- yang terdiri dari Aset Lainnya Tanah senilai Rp 25.523.107.000,- Aset Lainnya Peralatan dan Mesin senilai Rp 195.155.957,- Aset Lainnya Gedung dan Bangunan senilai 2.799.246.350,- dan Aset Lainnya Aset Tetap Lainnya senilai Rp 5.185.000,- dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp (907.447.583,42,-)

Dengan demikian Neraca Awal DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora terdiri dari Aset Tetap dan Aset Lainnya menjadi sebesar Rp 236.221.981.131,48,- yang terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp 207.526.834.324,48 yaitu Aset Tanah sebesar 4.905.020.690,-, Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 12.185.851.101,-, dan Aset Gedung dan Bangunan Rp 21.042.284.742,- Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 168.847.722.141,48,- dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 545.955.650,- sedangkan Aset Lainnya sebesar Rp 28.695.146.807,-, yang terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp 172.452.500,- dan Aset Lain-Lain sebesar Rp 28.522.694.307,- Setelah dilakukan penyusutan Aset maka terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 42.226.948.153,76,- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp 34.490.500,- dan Akumulasi Penyusutan Aset lain-Lain sebesar Rp 907.447.583,42,- Dengan adanya akumulasi penyusutan tersebut maka Aset Tetap menjadi sebesar Rp 207.526.834.324,48 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap Rp 42.226.948.153,76,- sehingga menjadi Rp 165.299.886.170,72,- Aset Tak Berwujud menjadi Rp 172.452.500,- dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 34.490.500,- sehingga menjadi Rp 137.962.000,- dan Aset Lain-Lain menjadi Rp 28.522.694.307,- dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain Rp 907.447.583,42,- menjadi sebesar Rp 27.615.246.723,58,- sehingga jumlah Aset Lainnya menjadi Rp 27.753.208.723,58,- Dengan demikian pada awal tahun 2018 setelah mendapatkan pengalihan aset dari Kominfo, DPU dan ESDM pada awal tahun 2017 dan ditambah pengadaan aset selama tahun 2017 maka pada awal tahun 2018 Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya menjadi Rp 193.053.094.894,30,- dan Aset Lancar sebesar Rp 183.182.019,- maka Total Aset pada awal Tahun 2018 sebesar Rp 193.236.276.913,30,-



Pada Tahun 2018 ini DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora mendapatkan alokasi dana untuk Belanja Modal sebesar Rp 71.200.344.100,- dan terealisasi sebesar Rp 68.820.929.320,- Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 510.448.900,- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 16.173.113.300,- dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 52.137.367.120,- Dari Belanja Modal tersebut yang dapat diakui sebagai aset tetap sebesar Rp 63.815.955.920,- Hal ini dikarenakan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ada yang tidak dapat diakui sebagai aset karena bersifat pemeliharaan yaitu sebesar Rp 1.324.694.400,- dan karena harga perolehannya dibawah Rp 300.000,- yaitu sebesar Rp 5.065.000,- Selain dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak dapat diakui sebagai aset juga berasal dari Belanja Jalan, Instalasi, dan Jaringan sebesar Rp 3.675.214.000,- juga karena bersifat pemeliharaan. Dari Realisasi Belanja Modal tersebut pengakuan asetnya ada yang tidak sesuai dengan belanja modalnya karena asetnya masuk kedalam klasifikasi aset yang tidak sama dengan belanja modalnya, yaitu realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin hanya sebesar Rp 510.448.900,- tapi pengakuan asetnya sebesar Rp 845.870.900,- yaitu terdapat selisih sebesar Rp 335.422.000,- merupakan pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan APIL yang berasal dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang terdiri dari Rambu-Rambu Lalu Lintas sebesar 79.667.000,- dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) sebesar Rp 255.755.000,- Dengan demikian untuk realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sebesar Rp 52.137.367.120,- pengakuan asetnya hanya sebesar Rp 51.801.945.120,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 335.422.000,- merupakan pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas sebesar Rp 79.667.000,- dan APIL sebesar Rp 255.755.000,-, sehingga dimasukkan ke dalam Aset Peralatan dan Mesin. Selain itu terdapat Aset yang berasal dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 155.772.000,- yaitu terdiri dari :

- AC sebanyak 6 unit sebesar Rp 29.937.500,-
- Komputer PC sebanyak 2 unit sebesar Rp 35.992.000,-
- Komputer Notebook sebanyak 4 unit senilai Rp 35.992.000,-
- Proyektor senilai Rp 21.934.000,- terdiri dari LCD senilai Rp 15.950.000,- dan Layar Proyektor senilai Rp 5.984.000,-
- Sound System senilai Rp 9.993.500,-
- Microphone sebanyak 10 unit senilai Rp 9.955.000,-

Selain itu terdapat reklas aset yang belanja modalnya dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp 179.518.600,- dan

Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) ke KIB F atau Konstruksi dalam Pengerjaan yaitu senilai Rp 7.378.705.000,- yang terdiri dari Pembangunan Gedung Serba Guna senilai Rp 1.877.100.000,- dan Rehab Masjid Baitunur senilai Rp 5.501.605.000,00. Dengan adanya aset Gedung dan Bangunan yang tidak dapat diakui sebagai aset karena nilainya dibawah Rp 300.000,- atau direklas ke Aset Paralatan dan Mesin (KIB B) dibawah Rp 300.000,- sebesar Rp 5.065.000,- maka jumlah Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) dibawah Rp 300.000,- menjadi sebesar Rp 51.626.400,- sedangkan Aset Lainnya KIB B dibawah Rp 300.000,- adalah sebesar Rp 67.673.650,-

Selain Reklas Aset, pada Tahun 2018 di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora juga mendapat pengalihan Aset Peralatan dan Mesin dari BPPKAD Kabupaten Blora sebesar Rp 373.879.000,- yang terdiri dari :

- PH Meter senilai Rp 3.190.000,-
- Alat Geolistrik senilai Rp 179.162.500,-
- Scanner senilai Rp 15.675.000,-
- Teleskope/Loup senilai Rp 3.872.000,-
- Meja Gambar senilai Rp 6.710.000,-
- Sound level meter/ deepmeter/ecosounding senilai Rp 33.891.000,-
- Meja Komputer senilai Rp 1.072.500,-
- Alat Logging senilai Rp 58.960.000,-
- Debetmeter/Watermeter senilai Rp 18.590.000,-
- UPS senilai Rp 24.128.500,-
- GPS senilai Rp 13.860.000,-
- Printer senilai Rp 14.767.500,-

Dan pengalihan Aset Gedung dan Bangunan berupa Panggung Blok T dari Dindagkop senilai Rp 143.431.000,00

Pengadaan Aset di DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada tahun 2018 ini terdiri dari :

- Pengadaan Mesin Las sebanyak 1 Unit senilai Rp 6.500.000,-
- Pengadaan alat-alat bengkel bermesin lainnya senilai Rp 4.000.000,- yang terdiri dari Mesin Jig Saw sebanyak 1 Unit
- Pengadaan AC sebanyak sebanyak 12 unit senilai Rp 59.796.000,-
- Pengadaan Kipas Angin sebanyak 2 unit senilai Rp 814.000,-
- Pengadaan Almari sebanyak 2 unit senilai Rp 5.940.000,-
- Pengadaan Mimbar Podium sebanyak 1 unit senilai Rp 2.475.000,-
- Pengadaan Komputer Notebook senilai Rp 11.990.000,- sebanyak 1 unit.
- Pengadaan Printer sebanyak 2 unit senilai Rp 7.986.000,-
- Pengadaan Meja Rapat sebanyak 17 unit senilai Rp 93.456.000,-

- Pengadaan Kursi Kerja sebanyak 2 unit senilai Rp 1.765.500,-
- Pengadaan Kursi Rapat sebanyak 70 unit senilai Rp 41.580.000,-
- Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang sebanyak 2 unit senilai Rp 17.578.000,00,-
- Pengadaan Meja Rias sebanyak 1 Unit senilai Rp 1.485.000,-
- Pengadaan Kursi Tamu sebanyak 1 Set senilai Rp 23.958.000,-
- Pengadaan Meja Resepsionis sebanyak 1 unit senilai Rp 18.535.000,00,-
- Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 1 unit senilai Rp 1.100.000,-
- Pengadaan Gorden sebanyak 1 Paket senilai Rp 139.726.400,-
- Pengadaan TV sebanyak 2 unit senilai Rp 10.989.000,-
- Pengadaan Alat Uji Emisi sebanyak 1 unit senilai Rp 60.775.000,-
- Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) senilai Rp 255.755.000,00,- terdiri dari 5 unit Cermin Tikungan Safety Mirror senilai Rp 19.920.000,- ; RPPJ sebanyak 1 unit di Simpang Empat Jl. Gunandar/SMPN 2 Blora senilai Rp 8.990.000,- ; Traffic Light Simpang Empat sebanyak 1 unit senilai Rp 197.305.000,- dan Pagar Pengaman Jalan senilai Rp 29.540.000,- yaitu Godrill sepanjang 30 m
- Pengadaan Rambu-Rambu Lalu lintas senilai Rp 79.667.000,- yaitu terdiri dari Rambu-Rambu Lalu Lintas sebanyak 40 buah senilai Rp 56.267.000,- dan 36 buah Traffic Cone senilai Rp 23.400.000,-
- Pengadaan konstruksi jalan senilai Rp 15.135.107.000,-
- Pengadaan Konstruksi Trotoar senilai Rp 6.557.594.000,-
- Pengadaan konstruksi kanal permukaan senilai Rp 5.620.587.000,-
- Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum senilai Rp 4.484.586.000,-
- Pengadaan konstruksi instalasi pengolahan air limbah senilai Rp 1.658.700.000,-
- Pengadaan jaringan listrik senilai Rp 11.000.000,-
- Pengadaan instalasi listrik senilai Rp 6.367.834.120,-
- Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pertemuan senilai Rp 1.877.100.000,-
- Pengadaan konstruksi/pembelian sarana umum taman senilai Rp 5.006.074.800,-
- Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan makam senilai Rp 279.672.700,-
- Rehabilitasi/pemeliharaan konstruksi jalan yang dikapitalisasi senilai Rp 3.660.219.000,-

- Rehabilitasi/pemeliharaan konstruksi trotoar yang dikapitalisasi senilai Rp 8.113.172.000,-
- Rehabilitasi/pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang yang dikapitalisasi senilai Rp 193.146.000,-
- Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor yang dikapitalisasi senilai Rp 3.508.660.800,-
- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana umum ibadah yang dikapitalisasi senilai Rp 5.501.605.000,-

Jadi Total Pengadaan Aset DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada Tahun 2018 ini sebesar Rp 68.820.929.320,- dan yang bisa diakui aset hanya sebesar Rp 63.815.955.920,- Pada awal tahun 2018 DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora Neraca Awal pada tahun 2018 terdiri dari Aset Lancar senilai Rp 183.182.019,- Aset Tetap senilai Rp 207.526.834.324,48,- dan Aset Lainnya senilai Rp 28.695.146.807,- yang terdiri dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 172.452.500,- dan Aset Lain-lain sebesar Rp 28.522.694.307,- Dengan akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp 42.226.948.153,76,- akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp 907.447.583,42,- dan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp 34.490.500,- sehingga jumlah aset menjadi Rp 193.236.276.913,30,- yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp 183.182.019,00,- Aset Tetap senilai Rp 165.299.886.170,72,- dan Aset lainnya senilai Rp 27.753.208.723,58,- Pada tahun 2018 dilakukan koreksi Neraca Audited yaitu penambahan akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp 0,03 dan akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan (KIB D) sebesar Rp 524.878,02 serta pengurangan nilai aset gedung dan bangunan (KIB C) senilai Rp 1,- dan setelah ditambah dengan Pengadaan Aset Tahun 2018 yang bisa diakui sebagai aset sebesar Rp 63.815.955.920,- dan adanya koreksi serta pengalihan aset baik yang menambah maupun mengurangi aset maka Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora sebelum Penyusutan menjadi Rp 300.711.019.050,48,- dengan jumlah Aset Tetap sebesar Rp 272.015.872.243,48 dan Aset Lainnya sebesar Rp 28.695.146.807,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 62.098.447.173,57 (ada koreksi Rp 1,-) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp 68.981.000,- dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp 934.966.835,17,- maka Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada akhir tahun 2018 menjadi sebesar Rp 237.608.624.041,74,- dan Aset Lancar sebesar Rp 188.825.112,00,- maka Jumlah Aset DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora pada akhir tahun 2018 menjadi sebesar Rp 237.797.449.153,74

Pada Akhir Tahun 2018 Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora mempunyai Kewajiban, yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 545.005.807,- Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 77.326.684,- dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 467.679.123,- Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora merupakan nilai dari Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Ijin Trayek yang sampai dengan akhir tahun 2018 belum diakui karena retribusi ini mempunyai jangka waktu tertentu. Pada Awal Tahun 2018 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 79.309.784,- yang terdiri dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 71.257.800,- dan Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp 8.051.984,- dan Pada Tahun 2018 terdapat penerimaan pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ijin Trayek sebesar Rp 345.963.300,- dan sampai dengan akhir tahun 2018 yang sudah diakui sebesar Rp 347.946.400,- yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp 343.050.416,- dan Retribusi Ijin Trayek-LO sebesar Rp 4.895.984,- dan sehingga pada akhir tahun 2018 di Neraca Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 77.326.684,- yang terdiri dari Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 70.241.185,- dan Ijin Trayek sebesar Rp 7.085.499,-

Selain Pendapatan Diterima Dimuka, Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora juga terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 467.679.123,- Utang Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Jaminan sebesar Rp 15.850.000,- yang merupakan Kas di Bendahara Penerimaan karena adanya uang jaminan dari para penyewa rusunawa yang nantinya akan dikembalikan jika kontraknya sudah selesai. Pada awal Tahun terdapat Utang Jaminan sebesar Rp 17.800.000,- kemudian dikarenakan ada penghuni yang sudah keluar dari rusunawa maka uang jaminannya disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 3.400.000,- Selama Tahun 2018 terdapat penghuni baru dengan Uang jaminan total sebesar Rp 5.650.000,- tetapi pada akhir tahun juga terdapat penghuni yang keluar dari rusunawa sehingga uang jaminannya juga disetor ke Kas Daerah kembali sebesar Rp 4.200.000,- Selain Utang Jaminan, Utang Jangka Pendek Lainnya juga berasal dari Beban Tahun 2018 yang masih harus dibayar di Tahun 2019 sebesar Rp 451.829.123,- yang terdiri dari Beban Telepon sebesar Rp 216.815,- Beban Listrik sebesar Rp 446.033.108,- Beban Internet sebesar Rp 1.922.500,- dan Beban Air/PDAM sebesar Rp 3.656.700,-

Penjelasan Laporan Neraca dapat diringkas sebagai berikut :

1. Aset

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Aset	237.797.449.154,74	193.236.276.913,30

Aset DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 senilai Rp 237.797.449.154,74 terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya dengan sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1	Aset Lancar	188.825.112,00	183.182.019,00
1.2	Aset tetap	209.917.425.069,91	165.299.886.170,72
1.3.	Aset lainnya	27.691.198.971,83	27.753.208.723,58
	Jumlah	237.797.449.153,74	193.236.276.913,30

Rincian aset adalah sebagai berikut:

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Aset Lancar	188.825.112,00	183.182.019,00

Aset lancar terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	-
1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	15.850.000,00	17.800.000,00
1.1.3.	Piutang Retribusi	48.352.500,00	48.352.500,00
1.1.7.	Penyisihan Piutang	(68.318.695,00)	(66.366.377,00)
1.1.4.	Piutang Lainnya	116.719.043,00	126.255.396,00
1.1.5.	Persediaan	76.222.264,00	57.140.500,00
	Jumlah Aset Lancar	188.825.112,00	183.182.019,00

1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	15.850.000,00	17.800.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp 15.850.000,- yang merupakan uang jaminan para penyewa rusunawa yang nantinya akan dikembalikan kalau jatuh tempo sewanya sudah habis.

1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1.3.	Piutang Retribusi Daerah	48.352.500,00	48.352.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2018 sebesar Rp 48.352.500,-

1.1.4. Piutang Lainnya

	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1.3.	Piutang Lainnya	116.719.043,00	126.255.396,00

Saldo piutang lainnya Rp 116.719.043,- tersebut merupakan saldo Piutang Penjualan Angsuran Kios per 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.480.000 dan Piutang Pendapatan Rusunawa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 97.239.043,-

1.1.5. Penyisihan Piutang

	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1.4.	Penyisihan Piutang	68.318.695,00	66.366.377,00

Untuk dapat menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan maka dilakukan penghitungan penyisihan piutang dari nilai piutang tersebut diatas dengan menggunakan metode prosentase sebagai berikut:

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
0 – 1 bulan	0,5%
1 – 3 bulan	10%
3 – 12 bulan	50%
Lebih dari 12 bulan	100%

Sehingga secara keseluruhan nilai piutang kotor, penyisihan piutang dan piutang yang dapat direalisasikan untuk masing-masing piutang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Kotor (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Yang Dapat direalisasikan (Rp)
1.	Piutang Angsuran Kios	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00
2.	Piutang Sewa Rusunawa	97.239.043,00	486.195,00	96.752.848,00
3.	Piutang Parkir Umum	48.352.500,00	48.352.500,00	0,00
	JUMLAH	165.071.543,00	68.318.695,00	96.752.848,00

#### 1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.1.5. Persediaan	76.222.264,00	57.140.500,00

Jumlah Persediaan sebesar Rp 76.222.264,- tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2018 yaitu terdiri dari Persediaan Barang Cetak sebesar Rp 76.222.264,00

#### 1.2. Aset Tetap

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2. Aset Tetap	209.917.425.069,91	165.299.886.170,72

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2.1.	Tanah	4.905.020.690,00	4.905.020.690,00
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	13.740.891.601,00	12.185.851.101,00
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	28.470.846.041,00	21.042.284.742,00
1.2.4.	Jalan Irigasi dan jaringan	216.974.453.261,48	168.847.722.141,48
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	7.378.705.000,00	545.955.650,00
1.2.6.	Konstruksi dlm Pengerjaan		0,00
1.2.7.	Akumulasi Peyusutan	(62.098.447.173,57)	(42.226.948.153,76)
	Jumlah	209.917.425.069,91	165.299.886.170,72

## 1.2.1. Tanah

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2.1. Tanah	4.905.020.690,00	4.905.020.690,00

## 1.2.2. Peralatan dan Mesin

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2.1. Peralatan & Mesin	13.740.891.601,00	12.185.851.101,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 adalah Rp 13.740.891.601,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Alat-alat Berat	39.435.000,00	39.435.000,00
Alat-alat angkutan	4.015.838.133,00	4.015.838.133,00
Alat Bengkel	640.899.900,00	600.479.900,00
Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	1.925.000,00	1.925.000,00
Perlengkapan Kantor	328.320.200,00	222.647.700,00
Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.962.839.405,00	1.292.551.405,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	173.674.900,00	142.737.400,00
Alat-alat ukur	2.591.842.813,00	2.219.542.313,00
Alat-alat keamanan	3.986.116.250,00	3.650.694.250,00
Jumlah	13.740.891.601,00	12.185.851.101,00

1.2.3. Gedung dan Bangunan

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2.3. Gedung dan Bangunan	28.470.846.041,00	21.042.284.741,00

1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2.4. Jalan, Irigasi Jaringan	216.974.453.261,48	168.847.722.141,48

1.2.5. Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2.5. Aset Tetap Lainnya	545.955.650,00	545.955.650,00

1.1. Aset Lainnya

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.2. Aset Lainnya	27.691.198.971,83	27.753.208.723,58

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1.3.1.	Aset Tak Berwujud	172.452.500,00	172.452.500,00
1.3.2.	Akumulasi Amortisasi	(68.981.000,00)	(34.490.500,00)
1.3.3.	Aset Lain-lain	28.522.694.307,00	28.522.694.307,00
1.3.4.	Akumulasi Penyusutan	(934.966.835,17)	(907.447.583,42)
	Jumlah	27.691.198.971,83	27.753.208.723,58,00

2. Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
2. Kewajiban	545.005.807,00	485.695.900,00

Jangka Pendek

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
2.1.	Pendapatan Diterima Dimuka	77.326.684,00	-
2.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya	467.679.123,00	-
	Jumlah	545.005.807,00	-

3. Ekuitas

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
3. Ekuitas	237.252.443.346,74	192.742.324.556,30

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas dan RK PPKD per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
3.1.	Ekuitas	151.638.553.024,74	115.731.969.356,30
3.2.	RK PPKD	85.613.890.322,00	77.010.355.200,00
	Jumlah	237.252.443.346,74	192.742.324.556,30

6.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.3.1. Pendapatan-LO	0,00	1.095.761.601,00	955.711.758,00

Realisasi Pendapatan-LO adalah realisasi hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.095.761.601,00	955.711.758,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00
Jumlah	1.095.761.601,00	955.711.758,00

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.3.1 Pendapatan Asli Daerah- LO	1.095.761.601,00	955.711.758,00

Pendapatan asli daerah – LO adalah realisasi pendapatan yang dicatat berdasarkan basis accrual yaitu senilai Rp. 1.095.761.601,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	904.155.400,00	782.801.533,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah-LO	191.606.201,00	172.910.225,00
Jumlah	1.095.761.601,00	955.711.758,00

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.3.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah- LO	904.155.400,00	-

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut merupakan realisasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Retribusi Jasa Umum-LO		
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-LO	15.080.000,00	13.670.000,00
- Retribusi pelayanan Parkir	412.500.000,00	371.196.500,00

Tepi Jalan Umum-LO - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	343.050.416,00	332.554.154,00
Retribusi Jasa Usaha-LO - Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan-LO - Retribusi Terminal –LO - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	88.840.000,00 36.039.000,00 3.750.000,00	26.899.800,00 34.010.000,00 0,00
Retribusi Perijinan Tertentu - Retribusi Ijin Trayek-LO	4.895.984,00	4.471.079,00
Jumlah	904.155.400,00	782.801.533,00

Terdapat perbedaan nilai realisasi pendapatan retribusi pada Laporan Realisasi Anggaran yang dicatat menggunakan basis kas dengan Pendapatan Asli Daerah-LO yang dicatat dengan basis Akrual. Perbedaan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	LO	LRA
Pendapatan Retribusi Daerah	904.155.400,00	902.172.300,00

Terdapat perbedaan sebesar Rp 1.983.100,00  
Pendapatan Retribusi Daerah di LRA terdiri dari

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Retribusi Jasa Umum - Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat - Retribusi pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.080.000,00 412.500.000,00 342.171.300,00	13.670.000,00 371.196.500,00 333.232.100,00
Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan - Retribusi Terminal - Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	88.840.000,00 36.039.000,00 3.750.000,00	26.899.800,00 34.010.000,00 0,00
Retribusi Perijinan Tertentu - Retribusi Ijin Trayek	3.792.000,00	8.024.000,00
Jumlah	902.172.300,00	787.032.400,00

Perbedaan sebesar Rp 1.983.100,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : Terdapat Pendapatan Retribusi Daerah yang berbeda realisasinya di Laporan Realisasi

Anggaran dan yang terdapat dalam Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang ada di Laporan Operasional, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah yang di Laporan Operasional (LO) lebih banyak daripada realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Ijin Trayek dari Retribusi Perijinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah yang ada di Laporan Operasional tetapi yang nilainya berbeda dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 342.171.300,00 sedangkan di Laporan Operasional Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp 343.050.416,00 sehingga ada perbedaan sebesar Rp 879.116,00. Perbedaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp 879.116,00 dikarenakan untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan retribusi yang mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu 6 (enam) bulan sehingga tidak semuanya menjadi hak tahun 2018 dan masih merupakan pendapatan diterima dimuka. Demikian juga dengan Retribusi Ijin Trayek, di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.792.000,00 sedangkan di Laporan Operasional Retribusi Ijin Trayek-LO sebesar Rp 4.895.984,- sehingga ada perbedaan sebesar Rp 1.103.984,00. Perbedaan Retribusi Ijin Trayek dan Retribusi Ijin Trayek-LO sebesar Rp 1.103.984,00 dikarenakan untuk Retribusi Ijin Trayek yang merupakan retribusi yang mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) tahun untuk KP dan 5 (lima) tahun untuk SK Ijin Trayek sehingga tidak semuanya menjadi hak tahun 2018 Namun selain berasal dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Ijin Trayek tahun ini, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO juga berasal dari Pendapatan diterima dimuka dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah diakui haknya di tahun ini. Sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran yang diakui sebesar realisasi yang masuk ke Kas Daerah yaitu sebesar Rp 342.171.300,00 untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rp 3.792.000,00 untuk Retribusi Ijin Trayek. Pendapatan diterima dimuka pada akhir tahun 2017 yang menjadi saldo awal di tahun 2018 ini adalah sebesar Rp 79.309.784,00 yang merupakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ijin Trayek yang belum diakui di tahun 2017, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 71.257.800,00 dan Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp 8.051.984,00 Pada tahun 2018 ada penambahan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Ijin Trayek total sebesar Rp 345.963.300,00 (yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 342.171.300,00 dan Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp 3.792.000,00) sehingga menjadi Rp 425.273.084,00 Pada tahun

2018 yang sudah diakui sebagai pendapatan adalah sebesar Rp 347.946.400,00 yaitu terdiri dari Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp 4.895.984,00 dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 343.050.416,00 Dengan demikian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO adalah sebesar Rp 343.050.416,00 dan Retribusi Ijin Trayek-LO sebesar Rp 4.895.984,00 Untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO dan Retribusi Ijin Trayek-LO berbeda nilainya dengan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Ijin Trayek di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dikarenakan kedua retribusi ini merupakan retribusi yang memiliki jangka waktu tertentu sehingga untuk Laporan Operasional (LO) tidak semua diakui sebagai pendapatan karena bukan hak di Tahun 2018, dan masih sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka pada akhir tahun 2017 yang menjadi saldo awal di tahun 2018 ini adalah sebesar Rp 79.309.784,00 yang merupakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ijin Trayek yang belum diakui di tahun 2017. Seperti telah diuraikan diatas jika Pada tahun 2018 ada penambahan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Ijin Trayek total sebesar Rp 345.963.300,00 sehingga menjadi Rp 425.273.084,00 Pada tahun 2018 yang sudah diakui sebagai pendapatan adalah sebesar Rp 347.946.400,00 yaitu terdiri dari Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp 4.895.984,00 dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 343.050.416,00 Dengan demikian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO adalah sebesar Rp 343.050.416,00 dan Retribusi Ijin Trayek-LO sebesar Rp 4.895.984,00 Dengan demikian terdapat selisih dengan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Ijin Trayek di Laporan Realisasi Anggaran. Di Laporan Operasional Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp 343.050.416,00 sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 342.171.300,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 879.116,00 sedangkan Retribusi Ijin Trayek-LO sebesar Rp 4.895.984,00 sedangkan di Laporan Realisasi anggaran Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp 3.792.000,00 terdapat perbedaan sebesar Rp 1.103.984,00 Jika diuraikan perbedaan sebesar Rp 1.983.100,00 merupakan selisih antara Pendapatan di Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	Rp 879.116,00
Retribusi Ijin Trayek-LO	Rp 1.103.984,00
Selisih Pendapatan Retribusi di LO dan LRA	Rp 1.983.100,00

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
------------------------	------------------------

6.3.1.2. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	191.606.201,00,00	172.910.225,00
--	-------------------	----------------

Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO tersebut merupakan realisasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 yang terdiri dari

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios-LO	0,00	0,00
Pendapatan dari sewa Rusunawa - LO	191.606.201,00	172.910.225,00
Jumlah	191.606.201,00	172.910.225,00

Terdapat perbedaan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran yang dicatat menggunakan basis kas dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO yang dicatat dengan basis Akrual yaitu sebesar Rp 9.536.353,00 yang merupakan Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios yang merupakan setoran pendapatan atas Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 2.000.000,00 sehingga tidak tercatat dalam LO karena merupakan setoran Piutang dan bukan hak tahun ini sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran tercatat dan Pendapatan dari Sewa Rusunawa sebesar Rp 7.536.353,00. Perbedaan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	LO	LRA
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	191.606.201,00	201.142.554,00,00

Terdapat perbedaan sebesar Rp 9.536.353,00 Pendapatan Asli Daerah Lainnya di LRA terdiri dari

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios	2.000.000,00	7.130.000,00
Pendapatan dari sewa Rusunawa	199.142.554,00	72.422.725,00
Jumlah	201.142.554,00	79.552.725,00

Perbedaan sebesar Rp 9.536.353,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Terdapat Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berbeda realisasinya di Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO yang ada di Laporan Operasional, yaitu Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang di Laporan Operasional (LO) lebih sedikit daripada realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios maupun Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang di Laporan Operasional (LO) lebih sedikit daripada realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan Sewa Rusunawa. Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios yang merupakan setoran pendapatan atas Piutang Penjualan Angsuran Kios sebesar Rp 2.000.000,00 sehingga tidak tercatat dalam LO karena merupakan setoran Piutang dan bukan hak tahun ini sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran tercatat karena ada setoran ke kasda sebesar itu. Dan Pendapatan Sewa Rusunawa yang di Laporan Operasioal tercatat sebesar Rp 191.606.201,00 sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran tercatat sebesar Rp 199.142.554,00 Untuk Pendapatan Sewa Rusunawa karena ada surat perjanjian kontrak dari para penyewa rusunawa selama 3 (tiga) tahun maka diinput sebagai SKRD sehingga tercatat sebagai Piutang, yaitu sebesar Rp 80.100.000,00 untuk SKRD baru di tahun 2018, dan ditambah Piutang Sewa Tahun Lalu sebesar Rp 100.487.500,00 Dari total SKRD tersebut pada tahun 2018 terdapat pembayaran sewa rusunawa penyewa yang lama sebesar Rp 58.400.000,00 dan pembayaran sewa rusunawa untuk penyewa yang baru sebesar 18.050.000,00 yang akan mengurangi jumlah piutang sewa rusunawa dan pembayaran biaya PDAM dan biaya Listrik rusunawa serta denda keterlambatan pembayaran total sebesar Rp 88.505.304,00 (denda sebesar Rp 5.993.750,00 biaya listrik 63.432.398,00 dan PAM 19.078.735,00) dan seoran kekurangan denda sebesar Rp 100.000,00 kekurangan listrik sebesar Rp 1.447.900,00 kekurangan PAM sebesar Rp 240.400,00 setor Uang jaminan yang keluar tahun 2017 sebesar Rp 3.400.000,00 dan yang keluar tahun 2018 sebesar Rp 4.200.000,00 seerta setor uang pengelola yang 50% berdasarkan temuan BPK sebesar Rp 24.798.950,00, jadi total setoran denda dan lain-lain menjadi sebesar Rp 122.692.554,00 Jumlah setoran Rusunawa inilah, yaitu setoran biaya sewa sebesar Rp 76.450.000,00 dan biaya PDAM, Listrik, dan denda sebesar Rp 122.692.554,00 yang menjadi Pendapatan Sewa Rusunawa di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu sebesar Rp 199.142.554,00 Sedangkan untuk Pendapatan Sewa Rusunawa-LO di Laporan Operasional merupakan jumlah SKRD baru sebesar Rp 80.100.000,00 dan biaya PDAM, listrik, dan denda serta setoran-setoran kekurangan dan pengembalian sebesar Rp 122.692.554,00 yaitu sebesar Rp 202.792.554,00 dan dikurangi dengan koreksi pengurangan

SKRD yang akan mengurangi jumlah piutang apabila belum terbayar dikarenakan adanya penyewa baru yang keluar dari rusunawa, yaitu senilai Rp 6.375.000,00 dan koreksi piutang pendapatan sewa rusunawa karena adanya pembayaran denda, listrik, dan PAM sebesar Rp 4.811.353,00 atau total sebesar 11.186.353,00 sehingga jumlah Pendapatan Sewa Rusunawa-LO di Laporan Operasional menjadi Rp 191.606.201,00 Di Laporan Operasional Pendapatan Penjualan Angsuran Kios tidak tercatat atau sebesar Rp 0,00 sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 2.000.000,00 sedangkan Pendapatan Sewa Rusunawa-LO sebesar Rp 191.606.201,00 sedangkan di Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp 199.142.554,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 7.536.353,00 Jika diuraikan perbedaan sebesar Rp 9.536.353,00 merupakan selisih antara Pendapatan di Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan
Pendapatan atas Penjualan Angsuran Kios	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
Pendapatan dari sewa Rusunawa	191.606.201,00	199.142.554,00	(7.536.353,00)
Jumlah	191.606.201,00	201.142.554,00	9.536.353,00

### 6.3.2 Beban LO

Beban adalah konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa yang mengurangi ekuitas DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Beban operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Operasi	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Beban Pegawai	7.708.705.323,00	3.620.676.392,00
Beban Barang dan Jasa	0,00	6.806.221.755,00
Beban Persediaan	1.367.188.262,00	0,00
Beban Jasa	6.386.028.326,00	0,00
Beban Pemeliharaan	1.773.016.900,00	1.048.435.720,00
Beban Perjalanan Dinas	549.726.288,00	475.018.974,00
Beban Penyusutan	19.848.742.172,87	11.002.630.680,64
Beban Penyisihan Piutang	1.952.318,00	17.992.438,00
Beban Lain-Lain	5.004.973.400,00	2.562.894.500,00

Jumlah	42.640.332.989,87	25.533.870.459,64

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
------------------------	------------------------

6.3.2.1. Beban Pegawai-LO	7.708.705.323,00	3.620.676.392,00
---------------------------	------------------	------------------

Beban pegawai –LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp 7.708.705.323,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Pegawai	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan	4.580.684.641,00	1.767.802.425,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.642.822.000,00	766.146.800,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi	26.399.082,00	31.867.167,00
Beban Honorarium PNS	324.820.000,00	235.630.000,00
Beban Honorarium Non PNS	1.068.231.600,00	802.310.000,00
Beban Uang Lembur	16.920.000,00	16.920.000,00
Jumlah	7.708.705.323,00	3.620.676.392,00

Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
------------------------	------------------------

6.3.2.2 Beban Persediaan-LO	1.367.188.262,00	1.148.184.773,00
-----------------------------	------------------	------------------

Beban Persediaan–LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp 1.367.188.262,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Beban alat tulis kantor	122.645.800,00	89.315.900,00
Beban Dokumen/Administrasi Tender	0,00	840.000,00
Beban alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering )	42.430.200,00	23.192.000,00
Beban perangko, materai dan benda pos lainnya	2.340.000,00	5.877.700,00

Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	31.576.500,00	9.990.271,00
Beban bahan bakar minyak/gas	285.390.960,00	247.302.991,00
Beban piala trofi dan hadiah dalam bentuk barang lainnya	490.000,00	490.000,00
Beban barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi	6.000.000,00	2.250.000,00
Beban spanduk	21.200.000,00	15.200.000,00
Beban kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	10.000.000,00	0,00
Beban pupuk dan pembasmi hama	7.901.300,00	7.936.500,00
Beban baliho/banner	3.000.000,00	5.000.000,00
Beban barang peralatan dan perlengkapan yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi	59.816.000,00	7.129.100,00
Beban bahan/bibit tanaman	188.808.300,00	81.466.000,00
Beban bahan baku bangunan	335.806.300,00	465.467.400,00
Beban cetak	195.057.486,00	147.164.500,00
Beban penggandaan	46.425.416,00	39.562.411,00
Beban suku cadang peralatan dan perlengkapan lainnya	8.300.000,00	0,00
Jumlah	1.367.188.262,00	1.148.184.773,00
	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)

6.3.2.3 Beban Jasa-LO 0,00 5.658.036.982,00

Beban Persediaan-LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp 6.386.028.326,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Beban telepon	3.411.914,00	9.561.886,00
Beban air	23.667.100,00	12.113.100,00
Beban listrik	5.150.599.284,00	4.768.045.713,00
Beban surat kabar/majalah	9.910.000,00	9.990.000,00
Beban kawat/faksimili/internet	24.501.406,00	18.667.266,00
Beban jasa kebersihan/cleaning service	0,00	9.600.000,00
Beban jasa dokumentasi	2.000.000,00	1.250.000,00
Beban jasa service	59.403.651,00	54.293.863,00
Beban penggantian suku cadang	100.204.950,00	74.973.850,00
Beban pelumas	8.633.000,00	9.738.000,00
Beban Jasa KIR	44.400,00	136.800,00
Beban surat tanda nomor kendaraan	23.287.825,00	10.453.000,00
Beban sewa gedung/kantor/tempat	3.500.000,00	3.000.000,00
Beban Sewa Kamar/Penginapan	2.176.196,00	0,00
Beban makanan dan minuman	91.941.600,00	18.081.154,00

harian pegawai		
Beban makanan dan minuman rapat	37.995.000,00	48.580.000,00
Beban makanan dan minuman kegiatan	136.750.000,00	11.500.000,00
Beban pakaian kerja lapangan	187.630.000,00	125.486.650,00
Beban Pakaian Adat Daerah	18.000.000,00	0,00
Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	94.000.000,00	11.500.000,00
Beban jasa sosialisasi	0,00	15.000.000,00
Beban jasa konsultasi penelitian	171.667.000,00	176.463.000,00
Beban jasa konsultasi perencanaan kegiatan non fisik	208.220.000,00	48.620.000,00
Beban jasa konsultasi hukum, keuangan, pemerintahan dan pembangunan daerah	0,00	175.996.100,00
Beban jasa konsultasi komunikasi, informasi dan teknologi	0,00	44.986.600
Beban jasa konsultasi pengawasan kegiatan non fisik	27.085.000,00	0,00
Beban jasa tenaga ahli /instruktur/narasumber PNS	1.400.000,00	0,00
Jumlah	6.386.028.326,00	5.658.036.982,00

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.3.2.4 Beban Pemeliharaan -LO	1.773.016.900,00	1.048.435.720,00

Beban Pemeliharaan-LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi Rp 1.773.016.900,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Beban pemeliharaan jalan	262.000.000,00	173.218.500,00
Beban pemeliharaan alat-alat berat	11.959.500,00	48.165.000,00
Beban pemeliharaan alat-alat bengkel	98.010.000,00	14.800.000,00
Beban pemeliharaan peralatan kantor	23.500.000,00	5.212.020,00
Beban pemeliharaan mebeler	17.300.000,00	19.900.000,00
Beban pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	1.360.247.400,00	787.140.200,00
Jumlah	1.773.016.900,00	1.048.435.720,00

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.3.2.4. Beban Perjalanan Dinas-LO	549.726.288,00	475.018.974,00

Beban Perjalanan Dinas – LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp 549.726.288,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas-LO	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Beban perjalanan dinas dalam daerah	292.241.700,00	235.765.000,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	257.484.588,00	239.253.974,00
Jumlah	549.726.288,00	475.018.974,00

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.3.2.5. Beban Penyusutan-LO	19.848.742.172,87	11.002.630.680,64

Beban Penyusutan – LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp 19.848.742.172,87 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.194.799.281,40	1.016.053.803,46
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	422.377.611,05	191.765.502,47
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.169.555.528,67	9.706.420.849,46
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	34.490.500,00	34.490.500,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	27.519.251,75	53.900.025,25
Jumlah	19.848.742.172,87	11.002.630.680,64

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
--	------------------------	------------------------

6.3.2.6. Beban Penyisihan Piutang-LO	1.952.318,00	26.140.794,00
--------------------------------------	--------------	---------------

Beban Penyisihan Piutang – LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp 1.952.318,00 dengan rincian sebagai berikut: Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Angsuran Kios R7p 1.990.000,- dan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Rusunawa Rp 37.682,-

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.952.318,00	17.992.438,00
Jumlah	1.952.318,00	17.992.438,00

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.3.2.7. Beban Lain-lain-LO	5.004.973.400,00	2.562.894.500,00

Beban Lain-lain – LO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp 5.004.973.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
Beban Lain-Lain	5.004.973.400,00	2.562.894.500,00
Jumlah	5.004.973.400,00	2.562.894.500,00

Beban Lain-lain ini merupakan Realisasi Belanja Modal yang tidak dapat diakui sebagai aset karena hanya bersifat pemeliharaan yaitu berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 3.675.214.000,00 dan berasal dari Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.324.694.400,00 serta dari Belanja Gedung dan Bangunan yang tidak bisa diakui aset karena nilainya kurang dari Rp 300.000,- sebesar Rp 5.065.000,-

6.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.4.1. Ekuitas Awal	192.750.581.013,30	0,00

Ekuitas awal DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 192.750.581.013,30

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.4.2. Surplus Defisit LO	(41.544.571.388,87)	(24.569.458.494,64)

Jumlah surplus defisit LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah senilai Rp (41.544.571.388,87)

	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	432.543.400,31	140.309.684.307,94

Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar adalah adanya transaksi non kas yang mempengaruhi penambahan dan penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Blora, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2018 Jumlah (Rp)	Tahun 2017 Jumlah (Rp)
1.	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	140.309.684.307,94
2.	Lain-lain	432.543.400,31	-
	Jumlah	432.543.400,31	140.309.684.307,94

Realisasi 2018	Realisasi 2017
----------------	----------------



	(Rp)	(Rp)
6.4.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap	-	140.309.684.307,94
	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6.4.3.2. Lain-lain	432.543.400,31	-

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar lain-lain untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 432.543.400,31 merupakan jumlah penambahan dan pengurangan ekuitas yang terdiri penilaian kembali aset dan adanya transaksi lain-lain yang mempengaruhi nilai ekuitas DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora. Yang mengurangi jumlah ekuitas antara lain adanya koreksi neraca audited 2017 yaitu koreksi penambahan akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp 0,03 dan koreksi penambahan akumulasi penyusutan aset jalan, instalasi, dan jaringan (KIB D) sebesar Rp 524.878,02 serta koreksi pengurangan nilai aset gedung dan bangunan (KIB C) senilai Rp 1,- serta koreksi penambahan akumulasi penyusutan KIB C berdasarkan BA Rekon Aset senilai Rp 1,- sedangkan yang menambah jumlah ekuitas antara lain adanya pengalihan-pengalihan aset ke DINRUMKIMHUB, yaitu aset peralatan dan mesin dari BPPKAD senilai Rp 318.323.480,36 dan aset gedung dan bangunan yaitu panggung Blok T dari BPPKAD senilai Rp 114.744.800,00

#### Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar Tahun 2018

Penambahan		
- Pengalihan Aset Peralatan dan Mesin dari BPPKAD Kab. Blora	Rp	318.323.480,36
- Pengalihan Aset Gedung dan Bangunan dari Dindakkop Kab. Blora	Rp	114.744.800,00
Jumlah	Rp	433.068.280,36
Pengurangan		
- Koreksi Neraca Audited yaitu Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin (KIB B)	Rp	0,03
- Koreksi Neraca Audited yaitu Akumulasi Penyusutan Aset Jalan, Instalasi, dan Jaringan (KIB D)	Rp	524.878,02
- Koreksi Neraca Audited, yaitu Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) berkurang sebesar Rp 1,-		1,00

- Koreksi penambahan akumulasi penyusutan KIB C berdasarkan BA Rekon Aset		1,00
Jumlah	Rp	524.880,05
Koreksi Nilai Aset Tetap		0
Lain-Lain	Rp	432.543.400,31
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	432.543.401,31

## BAB VII

### PENJELASAN ATAS INFORMASI -INFORMASI NON KEUANGAN OPD

Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blera merupakan dinas baru yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blera Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blera dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang SOTK. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blera pada awalnya beralamatkan di Jalan Gunandar Nomor 6 Blera, kemudian pada Bulan Mei 2018 pindah alamat di Jalan Reksodiputro Nomor 6 Blera.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blera Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DINRUMKIMHUB Kabupaten Blera sebagai OPD baru gabungan dari Bidang Perhubungan yang semula termasuk Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika dan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Pertamanan dan Kelistrikan yang sebelumnya termasuk dalam Dinas Pekerjaan Umum memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - Subbagian Program dan Keuangan;
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
  - Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
  - Seksi Bangunan; dan
  - Seksi Perumahan dan Permukiman
- d. Bidang Kelistrikan dan Pertamanan, membawahkan :
  - Seksi Sarana Prasarana Energi dan Kelistrikan Wilayah I;
  - Seksi Sarana Prasarana Energi dan Kelistrikan Wilayah II; dan
  - Seksi Pertamanan dan Pemakaman
- e. Bidang Perhubungan, membawahkan :
  - Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
  - Seksi Angkutan; dan
  - Seksi Pengawasan, Pengendalian, Operasional, dan Keselamatan
- f. UPT, terdiri dari :
  - UPT Terminal dan Parkir, terdiri dari :

1. Kepala UPT Terminal dan Parkir; dan
2. Kepala Tata Usaha UPT Terminal dan Parkir

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dibentuk Bulan Desember 2016 yang merupakan bentukan atau penggabungan dari 3 (tiga) Bidang, di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora terjadi adanya beberapa penyesuaian-penyesuaian baik dalam program-program dan kegiatan yang harus disesuaikan dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora adalah melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

Adapun Tugas masing-masing Bidang sesuai dengan Lingkup Tugasnya adalah :

- Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan dan air bersih, bangunan dan perumahan.
- Bidang Kelistrikan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana energi dan kelistrikan serta pertamanan dan pemakaman.
- Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan, pengawasan, pengendalian, operasional dan keselamatan.

## BAB VIII

### PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora, terdiri dari:

- Pendapatan : Rp 973.000.000,00
- Belanja : Rp 89.899.031.150,00

2. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora sampai dengan tutup tahun anggaran 2018 mencapai sejumlah Rp 1.103.314.854,00 atau 113,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sejumlah Rp 973.000.000,00

3. Realisasi Belanja Daerah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora sampai dengan tutup tahun anggaran 2018 sebesar Rp 86.717.205.176,00 atau 96,46 % dari anggaran sebesar Rp 89.899.031.150,00

4. Saldo Neraca Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Jumlah Aset	:	Rp 237.797.449.153,74
Jumlah Kewajiban	:	Rp 545.005.807,00
Jumlah Ekuitas Dana	:	Rp 237.252.443.346,74
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	:	Rp 237.797.449.153,74

Berdasarkan angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut diatas, maka pelaksanaan APBD Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 pada umumnya dapat berjalan lancar.

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora berupa Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018, maka Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora telah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan,

Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan keuangan diharapkan dapat membantu manajemen dan para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dengan demikian diharapkan penyusunan laporan keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.

Blora, 31 Desember 2018

Kepala DINRUMKIMHUB Kabupaten Blora

Ir. SAMSUL ARIEF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601025 198903 1 009